



KURIKULUM

**Pelatihan Fasilitator
Penyusunan Rencana Kontinjensi
Dengan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas,
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB),
dan Pelibatan Lembaga Usaha**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Tahun 2018

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA

Edisi I, 2018

Pengarah

Dr. Agus Wibowo, M.Sc
Drs. Hermana
Ir. Afrial Rosya, MA
R. Theodora Eva YA, M,Si
Sugiman, S.Ag.

Penulis

Agus Sardiyarso, Titi Moektidjasih, Nanang Suharto

Editor

Ujang D. Lesmana, Untung Tri Winarso

Layout

A.R Natsir

Penyusun Kurikulum oleh Tim Kerja Review Kurikulum Diklat Penyusunan Rencana Kontinjensi

Tim Kerja Review Kurikulum

Agus Sardiyaso, Dra. Enny Supartini, MM, Dian Andry Puspita Sari, Novi Kumalasari, Apriyuanda GBP, Nanang Suharto, Titi Moektijasih, Antonius Agus Haryanta, Fredy Chandra, Indah Fitrianasari, Nini Jannah, Ujang Dede Lesmana.

Reviewer

Dra. Eny Supartini, MM., R. Sigiharto, Siswanto BP, Adi Pamungkas, H. Iskandar Leman.

Kontributor:

Apriyuanda Giant Bayu P, M.Sc., Roswanto, MM., Alam Maulana, Sri Hastuti, M.Si, Jajat Suarjat, Dian Andry Puspita Sari, Novi Kumalasari, Tanti S. Reinhart, Rina Utami, Nini R Miftahul Jannah, I. Komang Kusumaedi, Norman, Arif Rianto BN, Fahrunnisaa Kadir, Kafarudin, Ujang D Lesmana, dan seluruh peserta ujicoba kurikulum (BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, BPBD Provinsi Maluku, BPBD Provinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Papua, BPBD Provinsi Papua Barat).

Diterbitkan oleh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bekerjasama dengan program Technical Assistance and Training Teams (TATTs) atas dukungan USAID

Gedung INA DRTG

Kawasan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Komplek IPSC)
Jl. Anyer Desa Tangkil Sentul, Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat 16810
Telp. (021) 29618775
Fax. (021) 29618775
Email: pusdiklat.pb.bnppb@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit dengan menyebutkan sumber

Sanggahan

Penyusunan Kurikulum didukung oleh Perkumpulan Lingkar Anggota Konsorsium Program Technical Assistance and Training Teams (TATTs) melalui pendanaan USAID/OFDA. Pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini tidak serta merta mencerminkan opini resmi USAID/OFDA. Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN:

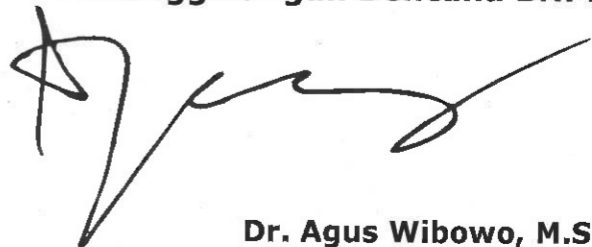
KATA PENGANTAR

Merujuk pada Sasaran Kebijakan strategis Penanggulangan Bencana 2015-2019 yaitu "Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi" dengan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana yang terpadu dan efektif.

Adanya kurikulum Diklat Penyusunan Rencana Kontinjensi dapat sebagai rujukan para pihak dalam melaksanakan pelatihan yang akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menyusun rencana kontinjensi dan disepakati bersama oleh para pelaku penanganan darurat, dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan sumberdaya yang disusun dalam suatu kerangka kerja penanganan darurat.

Kurikulum ini merupakan hasil kerjasama yang dilakukan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan USAID melalui Program Technical Assistance and Training Teams (TATTs) yang dilakukan oleh anggota konsorsium TATTs dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN dalam memberikan layanan Pengelolaan Risiko Bencana yang inklusif. Ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini bagi anggota Tim Kerja review kurikulum, tim penulis, tim review, observer, dan peserta ujicoba. Kurikulum ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengelola pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Namun demikian, saran dan masukan dari peserta dan pemangku kepentingan bagi pengembangan materi pembelajaran tetap dibutuhkan.

**Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana BNPB**



Dr. Agus Wibowo, M.Sc

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kerangka Dasar Kurikulum | 2 |
| 1. Landasan Konseptual | 2 |
| 2. Landasan Operasional | 2 |
| 3. Landasan Yuridis..... | 3 |
| C. Tujuan | 5 |
| 1. Tujuan Umum..... | 5 |
| 2. Tujuan Khusus | 5 |
| D. Kompetensi Lulusan..... | 5 |
| E. Pengertian | 5 |
| BAB II STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 10 |
| A. Prinsip Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi..... | 10 |
| B. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi..... | 10 |
| C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan | 13 |
| D. Struktur Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan | 18 |
| E. Silabus Pendidikan Dan Pelatihan | 20 |
| (A). Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi..... | 20 |
| 1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Kontinjensi | 20 |
| 2. Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi | 23 |
| 3. Teknik Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi | 25 |
| (B) Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi | 29 |
| 4. Identifikasi Data dan Informasi | 29 |
| 5. Pengelompokan Data dan Informasi | 32 |
| (C) Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi | 35 |
| 6. Identifikasi Peran Serta Pemangku Kepentingan..... | 35 |
| 7. Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana | 38 |
| 8. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana | 41 |
| 9. Peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana..... | 43 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (D). Prioritas Ancaman dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi | 46 |
| 10. Identifikasi Ancaman Bencana di Daerah | 46 |
| 11. Prioritas Ancaman Bencana yang akan Disusun dalam Rencana Kontinjensi | Error! Bookmark not defined. 47 |
| (E) Pengantar Penyusunan Rencana Kontinjensi | 49 |
| 12. Konsep Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi..... | 49 |
| 13. Format Dokumen Rencana Kontinjensi | 50 |
| (F). Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi..... | 53 |
| 14. Skenario Kejadian Bencana | 53 |
| 15. Asumsi Dampak Bencana | 54 |
| 16. Aturan Kerangka Kerja Penanganan darurat..... | 56 |
| 17. Teknik Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penanganan darurat | 58 |
| 18. Rencana Bidang Operasi Penanganan Darurat..... | 62 |
| a. Situasi, Sasaran, Kegiatan..... | 62 |
| b. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya..... | 66 |
| c. Ketersediaan Sumberdaya | 69 |
| d. Kesenjangan Sumberdaya..... | 71 |
| (G) Simulasi Draft Rencana Kontinjensi..... | 74 |
| 19. Uji Draft Rencana Kontinjensi..... | 74 |
| 20. Rencana Tindak Lanjut..... | Error! Bookmark not defined. 6 |
| a. Diseminasi | 77 |
| b. Prosedur Aktivasi Rencana Kontinjensi | 79 |
| c. Prosedur Kaji Ulang Rencana Kontinjensi..... | 82 |
| e. Penyusunan Ringkasan Dokumen Rencana Kontinjensi | 85 |
| d. Prosedur Formalisasi/Legalisasi | Error! Bookmark not defined. 87 |
| H. Kemampuan Fasilitasi. | Error! Bookmark not defined. 2 |
| 21. Fasilitasi Partisipatif..... | Error! Bookmark not defined. 2 |
| 22. Teknik Fasilitasi | Error! Bookmark not defined. |
| I. Kemampuan Fasilitasi. | Error! Bookmark not defined. 2 |
| 23. Penyiapan Bahan Pembelajaran..... | Error! Bookmark not defined. 2 |
| 24. Micro Teaching | Error! Bookmark not defined. |
| I. EVALUASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III PERENCANAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2007, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan payung hukum dalam penanggulangan bencana. Merupakan mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana dan perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana. Salah satu kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana kontinjensi yang merupakan proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi lebih baik situasi darurat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Indonesia *Disaster Relief Training Ground* (INA DRTG) di Sentul Jawa Barat adalah sebagai pusat pelatihan untuk pengembangan kapasitas para pelaku penanggulangan bencana. Untuk mendukung kegiatannya dibutuhkan perangkat lunak, berupa **kurikulum dan modul penanggulangan bencana**. Sejak Tahun 2004 telah ada kurikulum dan modul penyusunan rencana kontinjensi, kemudian oleh Pusdiklat PB pada Tahun 2012 telah dikembangkan kurikulum dan modul penyusunan rencana kontinjensi menghadapi ancaman bencana berbasis kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada Tahun 2016 dilakukan review terhadap kurikulum dan modul dimaksud untuk penyempurnaannya.

Untuk lebih meningkatkan materi kurikulum dan modul dimaksud, dilakukan pengayaan materi dengan memasukkan aspek pengarusutamaan gender, penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas, dan peran serta lembaga usaha dalam kurikulum dan modul rencana kontinjensi. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam materinya. Pengayaan materi kedalam kurikulum dan modul pelatihan penyusunan rencana kontinjensi berbasis kompetensi, dalam upaya mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat PB BNPB.

Sementara itu kebutuhan fasilitator yang berkompeten untuk memfasilitasi

penyusunan rencana kontinjensi saat ini masih terbatas, untuk itu diperlukan pelatihan bagi fasilitator penyusunan rencana kontinjensi. Dengan demikian perlu menyiapkan kurikulum dan modul **pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi, dengan materi hasil** pengayaan aspek pengarusutamaan gender, penangananan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas, dan peran serta lembaga usaha dalam dalam materi kurikulum dan modul pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi.

B. Kerangka Dasar Kurikulum

1. Landasan Konseptual

- a. Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki berbagai potensi positif. Namun demikian juga menyimpan potensi negatif yang dapat menimbulkan bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Potensi bencana tersebut yakni gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kegagalan teknologi serta bencana sosial/konflik social.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, meliputi tahap pra bencana, saat penanganan darurat, dan pasca bencana. Salah satu tahap kesiapsiagaan yakni perencanaan kontinjensi yang merupakan proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi lebih baik dalam situasi darurat.
- c. Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan rencana kontinjensi antara lain sumber daya manusia fasilitator yang masih terbatas, pembiayaan yang masih terbatas, serta hasil evaluasi/ observasi nya. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap hal-hal dimaksud untuk pengembangan di masa mendatang.
- d. Pengembangan kurikulum, didasarkan pula pada nilai-nilai sebagai berikut :
 - 1) Tanggap
 - 2) Tangkas
 - 3) Tangguh

2. Landasan Operasional

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), yang antara lain mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai klaster. KKNI ini terdiri atas 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah dan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi.

- b. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penjenjangan Diklat Teknis, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Diklat Teknis Substantif;
 - 2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
- d. Kurikulum dan Modul Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, Pusdiklat PB BNPB, Tahun 2012 serta draft kurikulum dan modul Tahun 2017.
- e. Draft Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi edisi ke 4 Tahun 2017, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional penanggulangan Bencana.

3. Landasan Yuridis

Dasar hukum dalam penyusunan kurikulum penyusunan rencana Kontinjensi menghadapi bencana adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/66/M.Pan/6/ 2005 tentang Jenjang Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender,
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2014 tentang Peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan pengurangan bencana
- m. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan ("Permen BUMN 5/2007");
- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
- o. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- p. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 10 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik.
- q. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana,
- s. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- t. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan kurikulum pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi dengan pengarusutamaan gender, disabilitas, pelibatan lembaga usaha, serta Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi, serta memberikan pegangan dan pedoman standar bagi fasilitator untuk melaksanakan pelatihan.

2. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi, peserta Diklat diharapkan mampu memfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi dengan pengarusutamaan gender, disabilitas, pelibatan lembaga usaha, dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), yang berbasis skenario risiko bencana dan disepakati bersama oleh pelaku penanganan darurat, dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan sumberdaya, serta disusun dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana.

D. Kompetensi Lulusan

Setelah mengikuti pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi dengan pengarusutamaan gender, disabilitas, pelibatan lembaga usaha, dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), yang berbasis kompetensi (bermuatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap), peserta **mampu memfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi** dengan tahapan materi prinsip dan proses serta penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, pengorganisasian data dan pengorganisasian pelaku, untuk menyusun dokumen rencana kontinjensi sesuai tahapan serta menyimulasikan draft rencana kontinjensi.

E. Pengertian

1. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan Perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
2. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
3. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu

tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

4. Bantuan penanganan darurat bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bidang operasi (Cluster) adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. Pelaku dalam Bidang operasi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
7. Data terpilah adalah nilai hasil pengamatan/pengukuran suatu variabel yang telah dikelompokkan menurut berbagai ciri, seperti jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu.
8. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.
10. Kaji Cepat adalah kegiatan pengkajian secara cepat mengenai kejadian bencana dan dampaknya yang meliputi aspek kehidupan/penduduk, prasarana sarana vital dan fasilitas umum, ekonomi, serta lingkungan. Kapasitas adalah sinergi dari semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak dari bencana
11. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
12. Kebutuhan khusus Gender kebutuhan praktis yang muncul akibat adanya perbedaan peran sosial dan domestik yang diharapkan dari perempuan dan laki-laki.
13. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Kemudahan akses adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan.

14. Kerentanan adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses, yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
16. Komando Penanganan darurat adalah organisasi penanganan penanganan darurat bencana yang memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan rantai dan garis komando yang jelas dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
17. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
18. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses latihan komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiapsiagaan terpadu.
19. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontinjensi agar menjadi legal secara hukum dan dipatuhi oleh instansi/lembaga terkait melalui Peraturan Kepala Daerah.
20. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan manajemen yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, penanganan darurat dan pemulihan darurat.
22. Operasi Penanganan darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Pemulihan Darurat adalah pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pada saat kegiatan penanganan darurat.

24. Penanganan darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
25. Penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
26. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.
27. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi terpadu dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan engendalian kebijakan dan program pembangunan nasional.
28. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksidengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
29. Penyandang disabilitas ganda atau tuna ganda adalah orang yang memiliki lebih dari satu jenis keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksidengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak
30. Penyintas adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian bencana atau guncangan lainnya.
31. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan.
32. Perencanaan Bidang operasi (*Cluster Planning*) adalah suatu rencana yang disusun oleh bidang operasi yang berisi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing bidang operasi untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
33. Perencanaan kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya disetujui bersama, untuk

- mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
34. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 35. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 36. Prosedur Operasi Penanganan darurat adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana secara terkoordinasi, terarah dan terpadu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
 37. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Rencana operasi ini disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan darurat dengan mempertimbangkan rencana kontinjensi dan hasil kaji cepat. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 38. Sinkronisasi adalah proses penyelarasan hasil perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui rapat koordinasi.
 39. Sistem Komando Penanganan darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang disepakati dan digunakan oleh semua instansi/lembaga dalam rangka mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran
 40. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
 41. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 42. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimum.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Prinsip Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Program pelatihan bertujuan mengembangkan kompetensi SDM (*Competency Based Training*). Kurikulum diklat berbasis kompetensi, merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan unit kompetensi yang dapat menghantarkan peserta diklat mencapai kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.

Ciri-ciri Rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

1. Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta pelatihan sebagai keluaran proses pembelajaran.
2. Materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan untuk profesi dimaksud.
3. Lebih menyinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar.
5. Disusun oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan pihak-pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu kompetensi pelaku.
6. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses pembelajaran mutu.

B. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi

Perencanaan kontinjensi (Renkon) menghadapi ancaman bencana merupakan proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat. Rencana kontinjensi merupakan langkah kesiapsiagaan untuk memetakan, menyiapkan bantuan penanganan darurat bencana, dan menyepakati mekanisme mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana tersebut, baik dari pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat bencana. Rencana Kontinjensi memiliki spesifikasi yang disusun dalam proses bersama dan terbuka, berlaku hanya untuk

satu jenis bahaya atau ikutan nya, memiliki skenario risiko dan masa berlaku ditandai dengan adanya indikasi bencana dan atau pernyataan resmi hingga terjadinya pemicu. Rencana kontinjensi menjadi dasar penyusunan rencana operasi Penanganan Darurat Bencana setelah adanya pemicu (keadaan darurat bencana) dan diaktivasi dan dengan hasil kaji cepat bencana untuk menyusun dokumen rencana operasi penanganan darurat. Rencana kontinjensi perlu dan harus dimutakhirkan/dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan komponen risiko. Untuk mengkomodir ciri-ciri dan spesifikasi penyusunan rencana kontinjensi tersebut, ditampung dalam materi-materi sebagai berikut :

Mata Diklat : Dasar Penyusunan Rencana Kontinjensi

(A). Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi

1. Prinsip-prinsip penyusunan rencana kontinjensi
2. Proses penyusunan rencana kontinjensi
3. Teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi

(B). Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi

4. Identifikasi data dan informasi
5. Pengelompokan data dan informasi

(C). Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi

6. Identifikasi serta Peran pemangku kepentingan
7. Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana
8. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
9. Peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana

(D). Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi

10. Identifikasi ancaman bencana di daerah
11. Prioritas ancaman bencana yang akan disusun dalam rencana kontinjensi.

Mata Diklat : Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

(E). Pengantar Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

12. Konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi
13. Format dokumen rencana kontinjensi

(F). Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

14. Skenario kejadian bencana
15. Skenario dampak bencana
16. Aturan kerangka kerja penanganan darurat bencana
17. Teknik Penyusunan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana
18. Rencana sektoral/kluster
 - a. Situasi, Sasaran, Kegiatan
 - b. Proyeksi kebutuhan sumber daya
 - c. Ketersediaan sumber daya
 - d. Kesenjangan sumber daya

(G). Simulasi Draft Rencana Kontinjensi

19. Uji draft rencana kontinjensi
20. Rencana Tindak Lanjut
 - a. Diseminasi rencana kontinjensi
 - b. Prosedur aktivasi
 - c. Prosedur kaji ulang
 - d. Penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi
 - e. Prosedur formalitas/ legalisasi

Mata Diklat : Keterampilan Memfasilitasi.

(H). Kemampuan Fasilitasi

21. Fasilitasi Partisipatif
22. Teknik Fasilitasi

(I). *Micro-Teaching*

23. Penyiapan Bahan Pembelajaran
24. Praktek *Micro-Teaching*

C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan

| No | MATA DIKLAT | INDIKATOR KEBERHASILAN | INDIKATOR HASIL BELAJAR | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE PEMBELAJARAN | WAKTU | EVALUASI | DAFTAR PUSTAKA |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | I. DASAR PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI | <p>Memahami dan menjelaskan dasar penyusunan rencana kontinjensi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan prinsip dan proses serta penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi dengan menggunakan analisa gender (<i>GAP ; Gender Analysis Pathway</i>), <i>gender Checklist</i>, <i>Washington Group Checklist for disability</i> serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas. ▪ Menjelaskan identifikasi serta pengelompokan data dan informasi penyusunan dokumen rencana kontinjensi. ▪ Mengidentifikasi pelaku penyusunan rencana kontinjensi dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, termasuk unsur disabilitas dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki. ▪ Mengidentifikasi ancaman dan prioritas ancaman dalam menyusun dokumen rencana kontinjensi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian rencana kontinjensi dan prinsip-prinsip penyusunan rencana kontinjensi dengan menggunakan analisa gender (<i>GAP : Gender Analysis Pathway</i>), <i>gender Checklist</i>, <i>Washington Group Checklist for disability</i> serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas. ▪ Membandingkan rencana kontinjensi dengan rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana operasi darurat bencana secara lebih rinci. ▪ Menjelaskan proses penyusunan rencana kontinjensi. ▪ Menjelaskan teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi. ▪ Mengidentifikasi serta pengelompokan data dan informasi untuk bahan analisis risiko bencana, penyusunan kerangka kerja penanganan darurat, serta perencanaan bidang operasi dalam pengerahan sumber daya kolektif saat penanganan darurat. ▪ Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan peran pemangku kepentingan penyusunan rencana kontinjensi, dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha, termasuk didalamnya unsur disabilitas dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki. ▪ Menjelaskan pengarusutamaan gender bidang penanggulangan bencana, saat pra | A. Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-prinsip penyusunan dan pengertian rencana kontinjensi 2. Proses penyusunan rencana kontinjensi 3. Tehnik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas | 3 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |
| | | | | B. Pengelolaan serta pengorganisasian data dan informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi data dan informasi 2. Pengelompokan data dan informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas | 2 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |
| | | | | C. Pengorganisasian Pelaku penyusunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pemangku kepentingan 2. Pengarusutamaan gender bidang penanggulangan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan | 4 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil | |

C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan

| No | MATA DIKLAT | INDIKATOR KEBERHASILAN | INDIKATOR HASIL BELAJAR | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE PEMBELAJARAN | WAKTU | EVALUASI | DAFTAR PUSTAKA |
|----|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | <p>bencana, saat penanganan darurat, dan kerjasama para pihak serta pengembangan kapasitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. ▪ Menjelaskan peran serta Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan. ▪ Mengidentifikasi jenis-jenis ancaman yang berpotensi akan terjadi di daerah, dengan menggunakan prinsip analisis risiko, ancaman, kerentanan, dan kemampuan. ▪ Menentukan kejadian bencana yang potensial saat itu, serta menentukan prioritas ancaman bahaya di suatu daerah. | <p>rencana kontinjensi</p> | <p>bencana</p> <p>3. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.</p> <p>4. Peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelas | | <p>Diskusi</p> | |
| | | | | <p>D. Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi</p> | <p>1. Identifikasi ancaman</p> <p>2. Prioritas ancaman bencana yang akan disusun dalam rencana kontinjensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas/ | <p>2 JP</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |

C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan

| No | MATA DIKLAT | INDIKATOR KEBERHASILAN | INDIKATOR HASIL BELAJAR | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE PEMBELAJARAN | WAKTU | EVALUASI | DAFTAR PUSTAKA |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | II. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI | <p>Menyusun dokumen rencana kontinjensi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dan keterwakilan perempuan serta laki-laki dalam seluruh proses penyusunan rencana kontinjensi tersebut. ▪ Menyusun format dokumen rencana kontinjensi dengan baik dan benar. ▪ Menyusun jenis-jenis skenario kejadian bencana. ▪ Menyusun asumsi dampak bencana dan pengembangannya. ▪ Mengidentifikasi dasar hukum, nilai-nilai penanganan darurat, prinsip kedaruratan untuk menyusun tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat. ▪ Menyusun bidang-bidang operasi penanganan darurat bencana. ▪ Memproyeksikan kebutuhan sumberdaya penanganan darurat, mengidentifikasi potensi ketersediaan sumberdaya, menganalisis kesenjangan sumberdaya serta mengidentifikasi alternatif strategi pemenuhannya. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rincian konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi. ▪ Menyusun format penyusunan dokumen rencana kontinjensi. ▪ Menyusun jenis-jenis skenario kejadian bencana. ▪ Menentukan skenario kejadian bencana yang paling mungkin terjadi dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan dokumen rencana kontinjensi. ▪ Mengembangkan berbagai asumsi dampak bencana berdasarkan risiko bencana yang telah ditentukan. ▪ Menentukan dan menyusun suatu asumsi dampak bencana. ▪ Menentukan dasar hukum, nilai-nilai penanganan darurat bencana, memamami prinsip kedaruratan serta tujuan, kebijakan dan strategi secara konseptual. ▪ Menyusun kerangka kerja tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana. ▪ Menyusun rencana bidang-bidang operasi penanganan darurat bencana meliputi situasi, sasaran dan kegiatan, serta kerja-kerja pada saat penanganan darurat melalui pembagian bidang operasi. Perumusan kegiatan berdasarkan tugas, kebutuhan, standard minimum dan prosedur masing-masing bidang operasi. ▪ Memproyeksikan kebutuhan sumberdaya penanganan darurat bencana, berdasarkan persyaratan standar minimum penanganan darurat yang berlaku. | E. Pengantar penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi 2. Format dokumen rencana kontinjensi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas | 2 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |
| | | | | F. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skenario kejadian bencana 2. Asumsi dampak bencana 3. Aturan kerangka kerja penanganan darurat 4. Teknik penyusunan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana. 5. Rencana Bidang operasi penanganan darurat. <ol style="list-style-type: none"> a. Situasi, sasaran, kegiatan b. Proyeksi kebutuhan sumberdaya c. Ketersediaan sumberdaya d. Kesenjangan sumberdaya | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas | 6 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |

C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan

| No | MATA DIKLAT | INDIKATOR KEBERHASILAN | INDIKATOR HASIL BELAJAR | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE PEMBELAJARAN | WAKTU | EVALUASI | DAFTAR PUSTAKA |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan secara rinci prosedur Uji draft rencana kontinjensi. ▪ Menyusun rencana tindak lanjut, meliputi diseminasi, prosedur aktivasi, prosedur kaji ulang, menyusun ringkasan dokumen rencana kontinjensi serta prosedur formalisasi/legalisasi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi potensi kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dengan mengacu pada fungsi–fungsi yang dijalankan oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kegiatan bidang operasi, serta ▪ Menganalisis kesenjangan sumberdaya serta mengidentifikasi alternatif strategi pemenuhannya. ▪ Menjelaskan kegiatan uji draft rencana kontinjensi melalui uji ruang (rapat koordinasi, TTX, uji Posko), serta uji lapang. ▪ Menyusun rencana tindak lanjut meliputi diseminasi, prosedur aktivasi, prosedur kaji ulang, penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi, serta prosedur formalisasi/legalisasi rencana kontinjensi. | <p>G. Simulasi Draft rencana kontinjensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji draft rencana kontinjensi 2. Rencana Tindak Lanjut <ol style="list-style-type: none"> a. Diseminasi b. rencana kontinjensi c. Prosedur aktivasi d. Prosedur kaji ulang e. Penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi f. Prosedur formalitas/ legalisasi | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelas | 2 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |
| | <p>III. KETRAMPILAN MEMFASILITASI</p> | <p>Mempraktekkan ketrampilan memfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan teknik-teknik memfasilitasi dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana. ▪ Menjelaskan fasilitasi melalui penyiapan serta mempraktekkan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempraktekkan teknik-teknik memfasilitasi dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana. ▪ Mempraktekkan fasilitasi melalui penyiapan serta mempraktekkan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang. | <p>H. Kemampuan Fasilitasi</p> <p>I. Micro-Teaching</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi partisipatif 2. Teknik Fasilitasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Bahan Pembelajaran 2. Praktek <i>Micro-Teaching</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Studi kasus • Curah gagasan • Diskusi kelompok | 5 JP 15 JP | <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi <ul style="list-style-type: none"> • Latihan • Tes Uraian • Hasil Diskusi | |

C. Rancang Bangun Mata Pendidikan dan Pelatihan

| No | MATA DIKLAT | INDIKATOR KEBERHASILAN | INDIKATOR HASIL BELAJAR | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE PEMBELAJARAN | WAKTU | EVALUASI | DAFTAR PUSTAKA |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|-------|----------|----------------|
| | | Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang. | | | | | | | |

D. Struktur Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan

| STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MATA DIKLAT | MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK | Waktu-JP | Jumlah-JP |
| I. Dasar Penyusunan Rencana Kontinjensi | A. Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi 1. Prinsip-prinsip penyusunan rencana kontinjensi 2. Proses penyusunan rencana kontinjensi 3. Teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi | 3 JP | 11 JP |
| | B. Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi 4. Identifikasi data dan informasi 5. Pengelompokan data dan informasi | 2 JP | |
| | C. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi 6. Identifikasi pemangku kepentingan dan peran pemangku kepentingan 7. Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana 8. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana 9. Peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana | 4 JP | |
| | D. Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi 10. Identifikasi ancaman bencana 11. Prioritas ancaman bencana yang akan disusun dalam rencana kontinjensi | 2 JP | |
| II. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi | E. Pengantar Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 12. Konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi 13. Format dokumen rencana kontinjensi | 2 JP | 10 JP |
| | F. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 14. Skenario kejadian bencana 15. Asumsi dampak bencana 16. Aturan kerangka kerja penanganan darurat bencana 17. Teknik Penyusunan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana 18. Rencana Bidang Operasi a. Situasi, Sasaran, Kegiatan b. Proyeksi kebutuhan sumber daya c. Ketersediaan sumber daya d. Kesenjangan sumber daya | 6 JP | |
| | G. Simulasi Draft Rencana Kontinjensi 19. Uji draft rencana kontinjensi 20. Rencana tindak lanjut a. Diseminasi rencana kontinjensi b. Prosedur aktivasi c. Prosedur kaji ulang d. Penyusunan Ringkasan dokumen rencana kontinjensi e. Prosedur formalitas/legalisasi | 2 JP | |

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| III. Keterampilan Memfasilitasi | H. Kemampuan Fasilitasi | 5 JP | 20 JP |
| | 21. Fasilitasi Partisipatif 22. Teknik Fasilitasi | | |
| | I. <i>Micro-Teaching</i> | 15 JP | |
| | 23. Penyiapan Bahan Pembelajaran 24. Praktek <i>Micro-Teaching</i> | | |

E. Materi Pokok - Silabus Pendidikan Dan Pelatihan

(A). Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi

1. Sub Materi Pokok - Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang pengertian rencana kontinjensi, prinsip-prinsip penyusunan rencana kontinjensi, keadaan darurat, kontinjensi dan pentingnya rencana kontinjensi, kedudukan rencana kontinjensi dalam penanganan darurat bencana, perbandingan dan hubungan antara rencana kontinjensi dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana mitigasi, rencana penanganan kedaruratan bencana (RPKB), dan rencana operasi penanganan darurat bencana.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan prinsip penyusunan rencana kontinjensi, jenis-jenis rencana dalam penanggulangan bencana, pengertian kontinjensi dan rencana kontinjensi, letak rencana kontinjensi dalam peraturan/perundangan, keterkaitan Rencana kontinjensi dengan Rencana operasi darurat bencana dalam penanggulangan bencana, menggunakan analisa gender (GAP ; *Gender Analysis Pathway*), gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability* serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan pengertian rencana kontinjensi dan prinsip-prinsip penyusunan rencana kontinjensi dengan menggunakan analisa gender (GAP : *Gender Analysis Pathway*), gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability* serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.

d. Materi

a) Jenis-jenis rencana dalam penanggulangan bencana.

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana (*multi hazard*)
- (2) Rencana Mitigasi
- (3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (*multi hazard*)
- (4) Rencana Kontinjensi (*single hazard*)

- (5) Rencana Operasi Darurat Bencana
 - (6) Rencana Pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi)
- b) Pengertian Kontinjensi dan Rencana Kontinjensi
- (1) Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
 - (2) Rencana Kontinjensi, suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
- c) Letak rencana kontinjensi dalam peraturan/perundangan
- (1) Rencana Kontinjensi tertera dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3), untuk satu ancaman bencana.
 - (2) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 35 ayat a, serta pasal 5 ayat (1), 6, dalam PP Nomor 21 Tahun 2008, bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan terarah, terpadu, dan terkoordinasi dan meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana, untuk menurunkan risiko bencana. Berisi peran dan tanggungjawab setiap pemangku kepentingan, untuk multi ancaman bencana.
 - (3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 45 ayat (2), serta pasal 16 ayat (2), 17, dalam PP Nomor 21 Tahun 2008, perencanaan dasar yang disusun untuk menanggulangi keadaan darurat secara efektif untuk berbagai ancaman bencana yang kemungkinan terjadi di suatu daerah, untuk multi ancaman bencana.
- d) Keterkaitan Rencana kontinjensi dengan Rencana operasi darurat bencana dalam penanggulangan bencana.
- (1) Siklus penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan rencana kontinjensi. Jenis-jenis perencanaan dalam siklus penanggulangan bencana dan siklus penanganan darurat bencana, masing-masing mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda.
 - (2) Rencana kontinjensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana, berisi kesepakatan bersama, tindakan teknis

dan manajerial, sistem respons dan pengalokasian sumberdaya terhadap skenario dampak sebuah bencana.

- e) *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Checklist*, kebutuhan khusus gender, data terpilah.

Konsep gender dan kesetaraan gender dan menguraikan mengenai kondisi perempuan di Indonesia dalam situasi bencana. Menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, termasuk kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana. Menjelaskan peraturan terkait pengarusutamaan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. **Jenis kelamin biologis adalah bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan.**

- f) Washington Group *Checklist* for disability dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

The Washington Group (WG) Short Set adalah seperangkat pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi (dalam format sensus atau survei) orang-orang penyandang cacat. Konsisten dengan tujuan pertanyaan WG, ini adalah orang-orang yang memiliki risiko lebih besar daripada populasi umum karena pembatasan partisipasi karena adanya kesulitan dalam enam domain fungsional inti, jika pemenuhan kebutuhan yang sesuai tidak tersedia. List Pertanyaan menanyakan apakah orang-orang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas universal dasar (berjalan, melihat, mendengar, berkenalan, peduli diri dan berkomunikasi) dan pada awalnya dirancang untuk digunakan dengan populasi umum. Namun, fokus pada fungsi dan keringkasan alat ini berarti dapat digunakan dengan cepat dan mudah dalam berbagai pengaturan.

e. Diskusi Kelas

Daftar pertanyaan :

1. Jelaskan apa arti kontinjensi.
2. Jelaskan apa arti rencana kontinjensi.
3. Jelaskan letak rencana kontinjensi dalam peraturan perundangan.
4. Jelaskan keterkaitan rencana kontinjensi dengan rencana operasi.
5. Jelaskan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Checklist, kebutuhan khusus gender, data terpilah.

6. Jelaskan Washington Group Checklist for disability dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
7. Jelaskan hubungan dengan penanganan darurat bencana, pemicu, cakupan, pihak-pihak terlibat, fokus perencanaan dengan mengacu kepada kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas, pengalokasian, waktu.
8. Jelaskan tentang kalimat efektifitas rencana kontinjensi ditentukan untuk membangun komitmen setiap pelaku yang terlibat dalam penyusunan rencana kontinjensi.

f. Jumlah JP

Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, 3 JP (@ 45 menit) = 135 menit.

2. Sub Materi Pokok - Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang proses penyusunan rencana kontinjensi, membandingkan rencana kontinjensi dengan rencana penanggulangan bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana operasi darurat bencana, hubungan rencana antar lembaga dengan rencana bidang, waktu penyusunan, masa berlaku dan pematkhiran, menggunakan analisa gender (GAP : Gender Analysis Pathway), Gender *Checklist*, Washington Group *Checklist* for disability serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan rencana kontinjensi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan proses penyusunan rencana kontinjensi, hakikat Perencanaan Kontinjensi, hubungan Rencana Antar Lembaga dengan Rencana Instansi dan Bidang, waktu Penyusunan, masa Berlaku dan Pematkhiran Rencana Kontinjensi, menggunakan gender Analysis Pathway (GAP), Gender *Checklist*, kebutuhan khusus gender, data terpilah dan Washington Group *Checklist* for disability dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:

- a) Membandingkan rencana kontinjensi dengan rencana penanggulangan

ke daruratan bencana (RPKB) dan rencana operasi darurat bencana secara lebih rinci.

- b) Menjelaskan tentang proses penyusunan rencana kontinjensi berbasis analisa gender, gender *Checklist*, Washington Group *Checklist* for disability dan mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.
- c) Menjelaskan tentang prinsip penyusunan rencana kontinjensi.

d. Materi

a) Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi

(1) Dasar Penyusunan Rencana Kontinjensi

- (a) Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi
- (b) Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi berbasis analisa gender, gender *Checklist*, Washington Group *Checklist* for disability serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.
- (c) Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi.
- (d) Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi
- (e) Identifikasi ancaman bencana di daerah

(2) Lanjutan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

- (a) Pengantar Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi
- (b) Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi
- (c) Simulasi Draft Rencana Kontinjensi

(3) Keterampilan Mengajar

- (a) Praktek fasilitasi

c) Hubungan Rencana Antar Lembaga dengan Rencana Instansi dan Bidang

Bagaimana membuat rencana instansi dan rencana bidang operasi menjadi rencana terintegrasi? RENKON harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak dan multi-bidang operasi yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana, termasuk dari pemerintah (bidang operasi-bidang operasi terkait), perusahaan negara, swasta, organisasi non-pemerintah, lembaga Internasional dan masyarakat.

d) Hakikat Perencanaan Kontinjensi

Penyusunan rencana kontinjensi disusun melalui proses, dan menjadi penting

karena disusun oleh peserta sendiri, sedangkan fasilitator hanya mengarahkan jalannya proses penyusunan perencanaan kontinjensi. Hakekat rencana kontinjensi antara lain :

- (1) Rencana kontinjensi merupakan milik daerah yang disusun melalui proses oleh peserta dan tim perumus daerah, sedangkan fasilitator hanya mengarahkan jalannya proses penyusunan perencanaan kontinjensi. Peserta daerah termasuk diantaranya gender, penyandang disabilitas, serta pelibatan lembaga usaha.
- (2) Skenario kejadian dan asumsi dampak, tujuan dan prosedur disepakati secara bersama, dan memprioritaskan penyelamatan jiwa manusia.
- (3) Menetapkan peran dan tugas setiap pemangku kepentingan berdasarkan fungsi dan tugas penanganan darurat bencana mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Berlaku untuk satu jenis ancaman bencana dengan memperhitungkan pemicu beserta kemungkinan bencana turunan yang akan terjadi (*collateral*).
- (5) Dibuat untuk menanggulangi keadaan selama masa penanganan darurat ditetapkan, dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat.
- (6) Mencantumkan komponen sumber daya yang realistis. Lebih ditekankan pengerahan sumber daya setempat, dan bukan rencana pembelian barang/jasa atau pembangunan prasarana/sarana (proyek).
- (7) Penjelasan *collateral*, adalah apabila suatu kejadian bencana mengakibatkan dampak terhadap berbagai aspek. Salah satu aspek misalnya kawasan industri terkeada dampaknya, akan mengakibatkan terjadinya bencana baru dan akan mengakibatkan dampak baru (ikutan).

e) Gender Analysis Pathway (GAP), Gender *Checklist*, kebutuhan khusus gender, data terpilah.

f) Washington Group *Checklist* for disability dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas

g) Waktu Penyusunan

Rencana kontinjensi disusun pada tahap pra bencana, selambat-lambatnya segera setelah muncul tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan dini.

h) Masa Berlaku dan Pemutakhiran Rencana Kontinjensi

- (1) Apabila terjadi bencana, maka rencana kontinjensi berakhir dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat dengan masukan hasil pengkajian cepat bencana.
- (2) Apabila tidak terjadi bencana, maka rencana kontinjensi akan dikaji ulang secara berkala untuk pemutakhiran data sesuai masukan pakar dan kesepakatan bersama. Pemutakhiran data harus dilakukan seakurat mungkin untuk membantu ketajaman pengkajian dan pemutakhiran rencana kontinjensi.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Jenis ancaman bencana apa saja yang ada di daerah.
- b) Kapan sebaiknya rencana kontinjensi terhadap ancaman tersebut disusun.
- c) Jelaskan proses penyusunan rencana kontinjensi.
- d) Jelaskan hubungan rencana antar lembaga dengan rencana instansi dan bidang
- e) Jelaskan hakikat perencanaan kontinjensi
- f) Jelaskan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Checklist, kebutuhan khusus gender, data terpilih.
- g) Jelaskan Washington Group Checklist for disability dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas
- h) Masa Berlaku dan Pemutakhiran Rencana Kontinjensi.

f. Jumlah JP

Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, 3 JP (@ 45 menit)
= 135 menit.

3. Sub Materi Pokok - Teknik Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini memberikan pemahaman tentang teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi untuk memperoleh produk dokumen rencana kontinjensi yang baik sesuai prinsip dan proses serta dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana operasi darurat bencana.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, meliputi tahapan penyusunan rencana kontinjensi, metodologi, materi penyusunan, peralatan dan bahan pendukung yang diperlukan selama lokakarya, kriteria peserta dan tim penyusunan, persyaratan fasilitator, dan narasumber, dengan memperhatikan gender, penyandang disabilitas serta pelibatan unsur lembaga usaha, serta penyelenggara penyusunan rencana kontinjensi, dengan memperhatikan analisa gender, gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability* serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas serta dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana operasi darurat bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran, peserta mampu menjelaskan teknik penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi dengan mempertimbangkan analisa gender, gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability* serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.

d. Materi

- a) Tahapan penyusunan rencana kontinjensi meliputi tahap dasar penyusunan rencana kontinjensi, tahap lanjutan penyusunan dokumen rencana kontinjensi, dan tahap ketrampilan mengajar.
- b) Metodologi penyusunan dokumen rencana kontinjensi dilakukan melalui lokakarya yang dipandu oleh fasilitator berkompeten. Melalui Pemaparan materi/modul oleh fasilitator, curah pendapat (*brain storming*), diskusi kelompok, paparan kelompok, praktek, dan menyimpulkan hasil diskusi.
- c) Materi penyusunan rencana kontinjensi sebagaimana yang diuraikan didepan, dengan pengayaan materi Analisa gender, Data pilah, gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability*. Kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas dalam penanganan darurat bencana.
- d) Peralatan dan bahan pendukung yang diperlukan selama lokakarya.
- e) Peserta dan tim penyusunan rencana kontinjensi berasal dari instansi/lembaga, antara lain :
 - Unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah:

- Kementerian/Lembaga terkait
 - TNI dari Kodam/Kodim/Koramil
 - POLRI dari Polda/Polres/Polsek
 - SKPD/OPD terkait di daerah
 - Unsur Masyarakat seperti:
 - Palang Merah Indonesia (PMI)
 - Kelompok Search and Rescue (SAR) dari masyarakat
 - Relawan Penanggulangan Bencana (Tagana, Pramuka, Mapala, dan lain-lain)
 - ORARI/RAPI
 - LSM/NGO/Organisasi Masyarakat Sipil
 - Perguruan Tinggi
 - Tokoh masyarakat/agama/adat
 - Unsur Dunia Usaha, seperti:
 - PLN
 - Telekomunikasi
 - Pertamina
 - Penerbangan (Bandara dan Pelabuhan)
 - Perbankan
 - Rumah Sakit
 - Media Massa
 - Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana
- f) Persyaratan fasilitator, dan narasumber. Fasilitator dapat berasal dari tingkat nasional, provinsi/kabupaten/kota, baik dari unsur pemerintah maupun unsur non-pemerintah.
- g) Memperhatikan gender, penyandang disabilitas serta pelibatan unsur lembaga usaha.
- h) Penyelenggara penyusunan rencana kontinjensi dari pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah yang dimaksudkan adalah BNPB sedangkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal ini adalah BPBD.

e. Diskusi Kelas

Fasilitator menyiapkan daftar pertanyaan untuk didiskusikan didalam kelas bersama seluruh peserta :

- a) Jelaskan teknik penyelenggaraan dan metodologi penyusunan rencana kontinjensi.
- b) Jelaskan dengan rinci materi lokakarya penyusunan

c) Siapa saja peserta, fasilitator, dan narasumber penyusunan rencana kontinjensi

f. Jumlah JP

Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, 3 JP (@ 45 menit) = 135 menit.

(B) Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi

4. Sub Materi Pokok - Identifikasi Data dan Informasi

a. Deskripsi Singkat

Data dan informasi merupakan elemen penting dalam penyusunan rencana kontinjensi. Diperlukan jenis-jenis data dan informasi kewilayahan, kebencanaan di daerah, peraturan dan kebijakan kebencanaan di daerah, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya lainnya. Data terpilah (perempuan, laki-laki, anak, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas) dibutuhkan untuk semua data mengenai kependudukan dan sumberdaya manusia.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta mampu menjelaskan definisi data dan informasi, identifikasi data dan informasi penyusunan rencana kontinjensi, data Kemungkinan Daerah Terdampak Bencana, data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah, tantangan dan kendala dalam pengumpulan data, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas untuk penyusunan dokumen rencana kontinjensi dengan benar.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi ini, peserta mampu mengidentifikasi data dan informasi untuk mendukung penyusunan rencana kontinjensi dengan analisa gender, gender *Checklist*, *Washington Group Checklist for disability*, serta mempertimbangkan kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas.

d. Materi

1) Definisi data dan informasi.

- a) Persyaratan data harus objektif, relevan, dan standar error kecil.
- b) Macam-macam data, berdasar sifatnya, kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan

sumbernya, data internal dan eksternal, cara memperoleh, serta data primer dan data sekunder.

- c) Definisi Data terpilah (perempuan, laki-laki, lansia, anak, bayi, balita, penyandang disabilitas sesuai jenis disabilitasnya).

2) **Identifikasi data dan informasi penyusunan rencana kontinjensi**

- a) Gambaran Umum Wilayah
- b) Data peta rawan bencana/peta risiko bencana wilayah kabupaten/kota/provinsi
- c) Data kependudukan, terpilah (perempuan, laki, lansia, anak, bayi, balita, penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya per kecamatan, kelurahan, desa
- d) Peruntukan lahan – rencana tata ruang
- e) Geologi dan Tanah
- f) Iklim dan Hidrologi
- g) Kehutanan, Industri, Pertanian
- h) Ancaman Bencana di Daerah
- i) Sejarah Kebencanaan Daerah
- j) Peraturan Daerah
- k) Peraturan Kepala Daerah
- l) Kebijakan Daerah
- m) Data analisa gender, *gender Checklist*
- n) Data Washington Group *Checklist* for disability,
- o) Data standar biaya umum
- p) Data standar pelayanan minimum
- q) Data standar pemenuhan kebutuhan dasar
- r) Prosedur tetap (Protap) instansi terkait
- s) Kebijakan dan peraturan daerah dan peraturan terkait lainnya
- t) Data "kabupaten/kota/provinsi dalam angka" dari BPS, data tentang ketersediaan sumberdaya dari masing-masing Bidang sesuai tugas dan fungsi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- u) Data terpilah berdasar produksi barang dan jasa lembaga usaha

3) **Data Kemungkinan Daerah Terdampak Bencana**

Data kependudukan, prasarana dan sarana vital dan fasilitas umum, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan. Data titik-titik pengungsian, jalur-jalur evakuasi, daya tampung tempat pengungsian.

4) **Data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah**

Data ketersediaan sumber daya masing-masing instansi/lembaga/ organisasi, baik sumber daya manusia, prasarana, sarana, bahan-bahan. manajemen, serta sumber daya lainnya, diperinci jumlah dan kapasitasnya. Sumberdaya tersebut akan di mobilisasi untuk melaksanakan penanganan darurat. Data ketersediaan sumberdaya manusia (perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas) dan keahliannya yang dapat diaktifasi sesuai tugas dan fungsi dalam penanganan darurat bencana mengacu pada SKPDB.

5) **Tantangan dan kendala dalam pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana kontinjensi, seringkali menemukan kendala-kendala. Beberapa tantangan dan kendala antara lain :

- a) Terbatasnya jumlah data dan informasi yang ada.
- b) Terbatasnya kualitas data dan informasi yang ada.
- c) Sumber data yang tidak sepenuhnya membuka data dan informasinya.
- d) Terpaksa mendapatkan data dan informasi dari luar daerah.
- e) Data dan informasi yang ada sudah tidak yang terbaru lagi.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Definisi data dan informasi.
- b) Data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan rencana kontinjensi.
- c) Jelaskan data analisa gender, gender Checklist
- d) Jelaskan data Washington Group Checklist for disability
- e) Jelaskan data yang berkaitan dengan lembaga usaha
- f) Data kemungkinan daerah terdampak bencana
- g) Data sumberdaya setiap instansi/lembaga/organisasi daerah
- h) Tantangan dan kendala dalam pengumpulan data

f. Jumlah JP

Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit

5. Sub Materi Pokok - Pengelompokan Data dan Informasi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta untuk Menjelaskan teknik pengelompokan data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana kontinjensi. Data terpilah (perempuan, laki-laki, anak, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitanya) dibutuhkan untuk semua data mengenai kependudukan dan sumberdaya manusia Data terpilah diberlakukan baik untuk data penduduk yang kemungkinan terapar maupun data sumberdaya manusia yang dapat difungsikan sesuai keahliannya dalam penanganan darurat bencana. Untuk itu diperlukan pengelompokan data dan informasi agar dapat secara tepat mendukung di tahap analisis risiko bencana, penyusunan kerangka kerja Penanganan Darurat Bencana, serta perencanaan bidang untuk pengerahan sumber daya saat Penanganan Darurat Bencana

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta mampu menjelaskan, teknik pengelompokan data, informasi serta pengorganisasian dalam penyusunan rencana kontinjensi, pengelompokan data dan informasi dalam penyusunan rencana kontinjensi, data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah lembaga Usaha, untuk penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu melakukan pengelompokan data dan informasi dari pemangku kepentingan sebagai bahan analisis risiko bencana, penyusunan kerangka kerja penanganan darurat bencana, serta perencanaan bidang dalam pengerahan sumber daya kolektif saat penanganan darurat. Data terpilah diberlakukan untuk data penduduk yang kemungkinan terapar dan data sumberdaya manusia yang dapat difungsikan sesuai keahliannya dalam penanganan darurat bencana.

d. Materi

- a) Teknik pengelompokan data, informasi serta pengorganisasian dalam penyusunan rencana kontinjensi.**

- (1) Pengumpulan data dan Informasi dilakukan untuk memperoleh
- (2) informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penyusunan. Data terpilah (perempuan, laki-laki, anak, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitynya) dibutuhkan untuk semua data mengenai kependudukan dan sumberdaya manusia. Data terpilah diberlakukan untuk data penduduk yang kemungkinan terapar dan data sumberdaya manusia yang dapat difungsikan sesuai keahliannya dalam penanganan darurat bencana.
- (3) Pengelompokan data terpilah baik gender maupun disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya dan informasi dalam analisis risiko bencana di daerah dengan menganalisis berbagai ancaman bencana di daerah, dan menentukan satu jenis ancaman bencana yang akan disusun rencana kontinjensi.
- (4) Pengelompokan data terpilah baik gender maupun disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya dan informasi dalam perencanaan penanganan darurat bencana sesuai fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh Komando Penanganan Darurat bencana untuk pengalokasian sumber daya kolektif saat penanganan darurat.

b) Pengelompokan data dan informasi dalam penyusunan rencana kontinjensi.

(1) Wilayah/Daerah

- (a) Gambaran Umum Wilayah
- (b) Data Kependudukan terpilah, baik gender maupun disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya, Kecamatan, Kelurahan, Desa
- (c) Peruntukan Lahan – Rencana Tata Ruang
- (d) Geologi dan Tanah
- (e) Iklim dan Hidrologi
- (f) Kehutanan, Industri, Pertanian

(2) Kebencanaan Daerah

- (a) Ancaman Bencana di Daerah
- (b) Sejarah Kebencanaan Daerah

(3) Peraturan dan Kebijakan Daerah Terkait Kebencanaan

- (a) Peraturan Daerah

- (b) Peraturan Kepala Daerah
- (c) Kebijakan Daerah

(4) Kemungkinan Daerah Terdampak Bencana

Kependudukan, Prasarana dan sarana vital dan fasilitas umum, Ekonomi, Pemerintahan, dan Lingkungan.

c) Data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah

- (1) Sumber Daya Manusia
- (2) Data terpilah gender maupun disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya
- (3) Prasarana
- (4) Sarana
- (5) Bahan

Seluruh sumberdaya yang tersedia dilakukan kepastian jumlah dan kapasitasnya, serta ketersediaannya. Termasuk sumber daya atau potensi pemerintah daerah setempat, sumber daya/potensi masyarakat setempat, dan lembaga usaha/swasta.

d) Lembaga Usaha

Rencana kegiatan pada tahap pra bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

e) Kegiatan meliputi :

- a) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
- b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
- c) Pengembangan budaya sadar bencana.
- d) Pengorganisasian, pemasangan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme Penanganan Darurat Bencana.
- e) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi, dan
- f) Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- 1) Teknik pengelompokan data, informasi serta pengorganisasian dalam

penyusunan rencana kontinjensi.

2) Sebutkan jenis data dan informasi dalam pengelompokan data dan informasi dalam penyusunan rencana kontinjensi.

- Wilayah/Daerah
- Kebencanaan Daerah
- Peraturan dan Kebijakan Daerah Terkait Kebencanaan
- Kemungkinan Daerah Terdampak Bencana
- Data Sumberdaya Setiap Instansi/Lembaga/Organisasi Daerah
- Lembaga Usaha dan Kegiatannya meliputi apa saja

f. Jumlah JP

Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit

(C) Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi

6. Sub Materi Pokok - Identifikasi Serta Peran Pemangku Kepentingan

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang identifikasi pemangku kepentingan serta peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rencana kontinjensi dan penanganan darurat bencana, baik dari unsur pemerintah, unsur masyarakat sipil, dan unsur dunia usaha, untuk bersama-sama menyusun perencanaan kontinjensi. Selain itu pengarusutamaan gender, partisipasi dan perlindungan disabilitas, serta keterlibatan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana, berpengaruh dalam pengorganisasian pelaku penyusunan rencana kontinjensi. Penting untuk dipastikan keterwakilan perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses penyusunan rencana kontinjensi.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mengidentifikasi keterwakilan dari semua pihak terkait dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha, termasuk didalamnya unsur disabilitas dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki, peran pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan peran pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kontinjensi, baik dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha, termasuk didalamnya unsur disabilitas dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki.

d. Materi

Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan secara bersama dan terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan bencana, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang disabilitas serta dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi, analisis risiko, pengembangan skenario, sampai dengan perencanaan bidang, serta tindak lanjut.

a) Pemangku Kepentingan Penyusunan Rencana Kontinjensi

Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan secara bersama dan terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan bencana, baik dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, dan penyandang disabilitas berdasarkan jenis stabilitasnya serta dengan memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki.

Identifikasi peran pemangku kepentingan Penyusunan Rencana Kontinjensi mengacu pada pemangku kepentingan yang berperan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, sebab dokumen rencana kontinjensi yang disusun pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana yang akan dilaksanakan oleh Komando Penanganan Darurat Bencana, sehingga sejak awal proses penyusunan rencana kontinjensi yaitu identifikasi pemangku kepentingan dan identifikasi peran pemangku kepentingan sudah harus mengacu pada peran dan tugas para pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana yang mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

b) Prinsip Inklusif dan Penyusunan Rencana Kontinjensi

Prinsip inklusif juga merupakan bagian dari identifikasi pemangku kepentingan antara lain dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas dalam semua proses penyusunan rencana kontinjensi.

c) Siapa yang mengidentifikasi pemangku kepentingan?

Pemangku kepentingan dapat diidentifikasi oleh internal BPBD atau penyelenggara penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

d) Kapan Pemangku Kepentingan diidentifikasi

Saat yang tepat mengidentifikasi Pemangku Kepentingan adalah ketika tahap persiapan penyusunan rencana kontinjensi.

e) Bagaimana mengidentifikasi pemangku kepentingan?

Dapat didahului dengan melakukan diskusi internal/rapat kecil BPBD atau antar tim kecil/persiapan.

f) Peran pemangku kepentingan

- (1) Peran-peran dalam penyusunan renkon yang akan tercermin dalam perencanaan bidang operasi, sangat ditentukan apa saja ruang lingkup aktivitas penanganan darurat. Aktivitas penanganan darurat merujuk pada apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Selain itu juga berdasarkan pada skenario kejadian yang dikembangkan dan disepakati bersama.
- (2) Peran pemangku kepentingan akan banyak pada saat penanganan darurat berupa bidang-bidang operasi penanganan darurat. Peran pemangku kepentingan betul-betul harus sesuai peran yang dapat dimainkan ketika penanganan darurat/ penanganan darurat bencana terjadi.
- (3) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, Penanganan Darurat Bencana, dan rehabilitasi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a. Siapa saja pemangku kepentingan penyusunan rencana kontinjensi
- b. Jelaskan prinsip inklusif dalam penyusunan rencana kontinjensi
- c. Siapa yang mengidentifikasi pemangku kepentingan?
- d. Kapan Pemangku Kepentingan diidentifikasi
- e. Bagaimana mengidentifikasi pemangku kepentingan?
- f. Sebutkan Peran pemangku kepentingan

f. Jumlah JP

Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi, 4 JP (@ 45 menit) = 180 menit.

7. Sub Materi Pokok - Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat penanganan darurat, dan kerjasama para pihak serta pengembangan kapasitas. Penting untuk dipastikan keterwakilan perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses penyusunan rencana kontinjensi.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri atas fungsi-fungsi sebagai berikut : Manajemen Pos Komando, Bidang Perencanaan, Bidang Sekretariat, Bidang Data Informasi dan Humas, Perwakilan Lembaga , Bidang Operasi dan Manajemen Pos Lapangan, olehnya peran-peran inilah yang harus diidentifikasi akan dilakukan oleh siapa saja dan/atau instansi apa saja

Identifikasi peran, fungsi dan tugas juga termasuk identifikasi sumberdaya manusia, peran perempuan laki laki dan penyandang disabilitas yang dapat diaktifasi sesuai keahliannya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang perencanaan yang responsif gender, pengintegrasian gender dalam kegiatan tim TRC, pengarusutamaan gender saat pra bencana, pengarusutamaan gender saat Penanganan Darurat serta kerjasama para pihak serta pengembangan kapasitas.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu menjelaskan tentang pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana, baik saat pra bencana, saat penanganan darurat, dan kerjasama para pihak serta pengembangan kapasitas.

d. Materi

Gender bukan berarti perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, status,

dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keadilan gender digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Keadilan adalah cara, kesetaraan adalah hasil. Analisis gender diperlukan untuk memetakan peran-peran kelompok masyarakat yang ada, termasuk pemangku kepentingan lain, isu dan alternatif penanganannya, sehingga program (berupa bantuan dan layanan) yang direncanakan lebih tepat sasaran. Gender analisis penting untuk menghasilkan analisis risiko bencana yang responsif gender. Laki-laki dan perempuan wajib dilibatkan dalam upaya-upaya mitigasi, termasuk dalam peran-peran substantif.

Perencanaan yang responsif gender akan menghasilkan penganggaran yang responsif gender (*money follow the plan*). Adanya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia akan mempertajam analisis risiko bencana yang diperlukan serta mempermudah pemetaan peran perempuan dan laki-laki dalam fase pra bencana. Selanjutnya dijelaskan mengenai mengintegrasikan gender dalam kegiatan tim TRC bukan berarti menambah tugas tim TRC namun untuk respons yang efektif dan tepat sasaran. Komposisi TRC yang seimbang antara anggota perempuan dan laki-laki adalah langkah awal untuk pengarusutamaan gender dalam kaji cepat bencana dan dampak bencana. Komposisi seimbang dan berdasarkan atas kemampuan teknis yang dapat digunakan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana juga dijelaskan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat berperan aktif dalam SKPDB sesuai keahlian masing-masing.

(a) Pengarusutamaan gender saat pra bencana.

- (1) Kajian risiko bencana responsif gender menggunakan data terpilah, untuk mengkaji perbedaan dalam tingkat penerimaan risiko antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Memperhatikan perbedaan risiko yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan.
- (3) Memperhatikan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan.
- (4) Memetakan dan melibatkan organisasi komunitas untuk memastikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam konsultasi dan pengumpulan data serta penyampaian informasi.
- (5) Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam kaji ulang dan pemutakhiran data risiko tahunan.

- (6) Identifikasi dan penilaian kapasitas responsif gender.
- (7) Peringatan dini responsif gender.
- (8) Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana responsif gender.

(b) Pengarusutamaan gender saat Penanganan Darurat

- (1) Penanganan Darurat Bencana responsif gender dilaksanakan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar saat Penanganan Darurat Bencana.
- (3) Dilaksanakan dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara aktif dan seimbang mulai dari pendataan hingga distribusi.
- (4) Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki-laki dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan melalui pemberian perlakuan khusus :
- (6) Penampungan dan hunian sementara dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.
- (7) Penyediaan layanan air bersih dan sarana sanitasi disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan, laki-laki dan anak-anak serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (8) Layanan kesehatan mudah diakses oleh perempuan, laki-laki dan anak-anak, serta disesuaikan dengan kebiasaan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (9) Layanan pendidikan melibatkan perempuan secara aktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, merancang, melaksanakan dan memantau layanan pendidikan.
- (10) Layanan psikososial atau pendampingan psikososial melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam pengumpulan data, perencanaan dan pelaksanaan.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

1. Jelaskan maksud dan tujuan pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana.
2. Jelaskan konsep pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana.
3. Jelaskan beberapa kegiatan pengarusutamaan gender saat pra bencana.

4. Jelaskan beberapa kegiatan pengarusutamaan gender saat penanganan darurat bencana.

f. Jumlah JP

Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi, 4 JP (@ 45 menit) = 180 menit.

8. Sub Materi Pokok - Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dipastikan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan rencana kontinjensi.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, tentang *WG Short Set* untuk mengidentifikasi sebagian besar, penyandang disabilitas, penyandang disabilitas saat pra bencana, penyandang disabilitas saat penanganan darurat bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu menjelaskan tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

d. Materi

WG Short Set tidak dirancang untuk digunakan dalam isolasi. Sebaliknya, alat tersebut harus digunakan bersamaan dengan alat ukur lainnya, yaitu memasukkan *WG Short Set* dalam survei atau formulir pendaftaran yang lebih besar untuk memungkinkan disagregasi tindakan lain (status pekerjaan, pencapaian pendidikan, dll.) Oleh status disabilitasnya. Karena kompleksnya disabilitas, pertanyaan dalam *short set* ini tidak dirancang untuk mengukur semua aspek kesulitan dalam berfungsinya yang mungkin dialami orang, namun domain fungsi berfungsi yang cenderung mengidentifikasi mayoritas orang yang berisiko terhadap pembatasan partisipasi. Jadi, sementara pertanyaan *WG Short Set* sendiri secara eksplisit hanya membahas keterbatasan dalam melakukan aktivitas dasar, mereka

dirancang untuk analisis dengan informasi lain dengan cara memasukkan model disabilitas bio-psikososial secara penuh.

WG *Short Set* akan mengidentifikasi sebagian besar, namun tidak semua, penyandang disabilitas. Bila informasi lebih rinci diperlukan, The Washington Group Extended Set on Functioning (WG ES-F) [pdf] dapat digunakan. Secara khusus, Extended Set mencakup informasi tentang fungsi tubuh bagian atas; kesulitan psikososial; sakit dan kelelahan; dan informasi tambahan di domain tertentu yang berfungsi baik dengan dan tanpa menggunakan teknologi bantu / bantu (misalnya kursi roda, alat bantu dengar). Juga, sementara Short Set akan mengidentifikasi banyak anak penyandang disabilitas, ia dapat melewatkan sejumlah besar anak-anak dengan masalah perkembangan atau psikososial. Untuk pertanyaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi tingkat disabilitas masa kanak-kanak yang lebih lengkap, lihat The Child Functioning Question Set [pdf], dikembangkan bersamaan dengan UNICEF.

WG Short Set tidak mengidentifikasi kondisi kesehatan atau kategori diagnostik tertentu namun menangkap kemungkinan dampak dari kondisi ini terhadap kemampuan fungsional. Pertanyaan tambahan dapat ditambahkan ke sebuah survei yang berisi Short Set untuk mendapatkan informasi tentang penyebab kesulitan fungsional.

(a) Penyandang Disabilitas Saat Pra Bencana

- (1) Pemetaan penyandang disabilitas menurut jenis dan kebutuhan disabilitasnya.
- (2) Sistem peringatan dini yang inklusif disabilitas
- (3) Sistem peringatan dini wajib menjangkau penyandang disabilitas secara tepat waktu, akurat dan melalui media yang sesuai dg jenis serta derajat disabilitas.
- (4) Setiap rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas wajib memiliki rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga.
- (5) Rencana penyelamatan/evakuasi yang inklusif

(b) Penyandang Disabilitas Saat Penanganan Darurat Bencana

- (1) Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk kegiatan rumah tangga

utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

- (2) Pendampingan psikososial bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas.
- (3) Alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas.
- (4) Pendampingan khusus dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh semula.
- (5) Dalam situasi bencana, wajib memastikan penyandang disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan bertindak diluar kemauan serta rasa takut.
- (6) Dalam situasi bencana wajib memastikan harta benda dan aset milik penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

1. Jelaskan maksud dan tujuan penanganan dan perlindungan disabilitas dalam perencanaan kontinjensi.
2. Jelaskan beberapa pertimbangan dalam memasukkan Penyandang Disabilitas Saat Pra Bencana.
3. Jelaskan beberapa pertimbangan dalam memasukkan Penyandang Disabilitas Saat Penanganan Darurat Bencana.

f. Jumlah JP

Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi, 4 JP (@ 45 menit) = 180 menit.

9. Sub Materi Pokok - Peran serta lembaga usaha dalam penanggulangan bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang peran serta keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mengidentifikasi peran serta keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan, peran Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana saat prabencana maupun saat bencana terjadi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu menjelaskan peran serta keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan.

d. Materi

(1) Peran Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana

- (a) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, Penanganan Darurat Bencana, dan rehabilitasi secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, Penanganan Darurat Bencana, dan rehabilitasi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (c) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana.
- (d) Lembaga Usaha yang akan berperanserta pada tahap prabencana atau pasca bencana harus menyusun:
 - (1) Nota kesepahaman
 - (2) Kerangka acuan kegiatan atau
 - (3) Rencana kegiatan
 - (4) Nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan atau rencana kegiatan tersebut disusun bersama-sama antara Lembaga Usaha dengan BNPB atau BPBD.
- (e) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan didasarkan

pada kapasitas sumberdaya Lembaga Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan Lembaga Usaha prabencana
 - (a) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
 - (b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
 - (c) Pengembangan budaya sadar bencana.
 - (d) Pengorganisasian, pemasangan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme Penanganan Darurat Bencana.
 - (e) Penyeberluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi, dan
 - (f) Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (3) Kegiatan Lembaga Usaha saat bencana
 - (a) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat memberikan bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD.
 - (b) Bantuan pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
 - (c) Kegiatan:
 - (1) Pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda.
 - (2) Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan.
 - (4) Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital
 - (5) Kegiatan lain yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Jelaskan peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana
- b) Kegiatan apa saja yang dilakukan Lembaga Usaha pada pra bencana
- c) Kegiatan apa saja yang dilakukan Lembaga Usaha Lembaga Usaha saat penanganan darurat bencana

f. Jumlah JP

Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi, 4 JP (@ 45 menit) = 180 menit.

(D). Prioritas Ancaman dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi

10. Sub Materi Pokok - Identifikasi Ancaman Bencana di Daerah

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang pemahaman tentang sejarah bencana dan kejadian bencana yang pernah terjadi, dan cara identifikasi ancaman berdasarkan karakteristik wilayah dan dokumen pendukung.

b. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu mengidentifikasi sejarah bencana dan kejadian bencana, potensi kejadian bencana, peraturan dan kelembagaan daerah dalam upaya penanggulangan bencana serta institusi/lembaga bertanggung, dan ancaman berdasarkan karakteristik wilayah dan dokumen pendukung.

c. Indikator Hasil Belajar

Mengidentifikasi jenis-jenis ancaman yang berpotensi akan terjadi di daerah.

d. Materi

- a) Sejarah bencana dan kejadian bencana yang pernah terjadi. Gambaran umum wilayah kondisi geografis, batas administrasi pemerintahan, demografi wilayah, topografi, iklim dan aspek terkait dengan kebencanaan lainnya.
- b) Potensi kejadian bencana, ancaman dan potensi kejadian bencana yang sering terjadi berikut dampaknya. Potensi bencana Alam, bencana Non-Alam, dan bencana Sosial. Apa saja jenis-jenis ancaman yang ada di daerah? Apakah ada jenis-jenis ancaman di luar hal-hal yang sudah disebutkan?
- c) Peraturan dan kelembagaan daerah yang mendasar upaya penanggulangan bencana serta institusi/lembaga bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan bencana di daerah.
- d) Identifikasi ancaman bencana di daerah dapat didasarkan pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerah atau kajian risiko yang dibuat oleh pakar yang disampaikan kepada BNPB/BPBD. Jika RPB atau kajian risiko oleh pakar belum ada, para pemangku kepentingan yang akan menyusun rencana kontinjensi dapat melakukan penilaian risiko secara sederhana

melalui penilaian bahaya.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Mengapa Sejarah bencana dan kejadian bencana yang pernah terjadi perlu untuk dipertimbangkan.
- b) Jelaskan mengapa Potensi kejadian bencana, ancaman dan potensi kejadian bencana yang sering terjadi berikut dampaknya sangat penting.
- c) Mengapa Peraturan dan kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana penting.
- d) Jelaskan Identifikasi ancaman bencana di daerah untuk menyusun rencana kontinjensi dengan melakukan penilaian risiko secara sederhana melalui penilaian bahaya.

f. Jumlah JP

Prioritas Ancaman dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit.

11. Sub Materi Pokok - Prioritas Ancaman Bencana yang akan Disusun dalam Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang elemen dan dinamika risiko bencana, cara menilai bahaya dan menganalisis risiko, menghubungkan jenis-jenis bahaya dengan prinsip analisis risiko, dan pada akhirnya menentukan prioritas kejadian bencana yang potensial saat itu. Perencanaan kontinjensi memerlukan SATU risiko bencana sebagai dasar analisis diikuti alasan dan implikasi gambaran risiko yang tidak definitif terhadap efektifitas perencanaan kontinjensi.

b. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu menentukan prioritas ancaman dalam menyusun dokumen rencana kontinjensi berdasarkan penilaian bahaya, konsep risiko bencana, pemahaman bahaya, kerentanan, risiko, dan kemampuan, penentuan satu kejadian Bencana dengan argumentasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu:

- a) Menjelaskan dinamika risiko bencana

- b) Menjelaskan prinsip analisis risiko, ancaman, kerentanan, dan kemampuan.
- c) Menentukan kejadian bencana yang potensial saat itu.
- d) Menentukan prioritas ancaman bahaya di suatu daerah.

d. Materi Pokok

a) Penilaian Bahaya

- (1) Konsep risiko bencana dalam kerangka kerja ISDR serta faktor yang berpengaruh, hal ini menduduki posisi sentral dalam rencana kontinjensi.
- (2) Pemberian ilustrasi untuk menjelaskan dinamika risiko bencana, dan
- (3) Pemahaman bahaya, kerentanan, risiko, kemampuan.
- (4) Pentingnya satu risiko dalam fokus perencanaan kontinjensi, yang menegaskan bahwa perencanaan kontinjensi memerlukan SATU risiko bencana sebagai dasar analisis diikuti alasan dan implikasi gambaran risiko yang tidak definitif terhadap efektifitas perencanaan kontinjensi.

b) Penentuan Kejadian Bencana

- (1) Penilaian risiko bencana untuk menentukan kejadian berdasarkan penilaian risiko tersebut. Titik berat pada latar belakang ancaman, kerentanan dan kemampuan, dampak terhadap unsur-unsur terancam termasuk kehilangan jiwa, kerusakan, luka-luka, pengungsian, dampak gangguan asset dan kesempatan pembangunan.
- (2) Menentukan SATU risiko bencana berdasar peringkat kegentingan risiko yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kontinjensi.
- (3) Memberikan argumen jenis ancaman apa yang paling potensial saat itu yang akan dilanjutkan dalam penyusunan rencana kontinjensi.

e. Diskusi Kelas

- (a) Jelaskan ancaman bencana di daerah, dengan pertimbangan variabel awal ancaman, kerentanan dan kemampuan.
- (b) Bagaimana cara memilih satu ancaman bencana yang akan dijadikan dalam penyusunan rencana kontinjensi.

f. Jumlah JP

Prioritas Ancaman dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit.

(E) Pengantar Penyusunan Rencana Kontinjensi

12. Sub Materi Pokok - Konsep Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjabarkan tentang konsepsi penyusunan dokumen rencana kontinjensi, sebagai dasar bagi penyusunan format dokumen rencana kontinjensi. Pada prinsipnya rencana kontinjensi merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat penanganan darurat bencana terjadi, melalui pengerahan berbagai sumberdaya.

2) Hasil Belajar

Setelah mempelajari mata diklat ini diharapkan mampu menjelaskan konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi dengan Setelah mempelajari mata diklat ini diharapkan mampu Menjelaskan konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi yang memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dan keterwakilan perempuan serta laki-laki dalam seluruh proses penyusunan rencana kontinjensi tersebut.

3) Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu menyusun perincian konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

4) Materi

a) Konsep rencana kontinjensi

Konsep rencana kontinjensi merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat penanganan darurat bencana oleh sektor-sektor terkait, dengan pengerahan berbagai sumber daya. Mengingat bencana belum terjadi, disusun suatu skenario kejadian bencana dan skenario dampak bencana dengan pendekatan keilmuan.

b) Tahap penyusunan rencana kontinjensi meliputi pengembangan skenario kejadian bencana, asumsi dampak bencana, penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat, perencanaan penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, serta rencana tindak lanjut.

5) Diskusi Kelas

Fasilitator menyiapkan daftar pertanyaan dalam diskusi kelas:

- a) Jelaskan tahapan sebelumnya
- b) Jelaskan konsep penyusunan rencana kontinjensi.
- c) Jelaskan apa tahapan penyusunan rencana kontinjensi.

6) Jumlah JP

Pengantar Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit

13. Sub Materi Pokok - Format Dokumen Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini memberikan pengalaman belajar untuk menyusun format pengantar dokumen rencana kontinjensi dan format dokumen rencana kontinjensi, sebagai dasar untuk mendapatkan dokumen rencana kontinjensi yang baik dan benar yang sesuai dengan standar yang ada.

b. Hasil Belajar

Pada akhir materi diklat, peserta mampu menyusun format dokumen rencana kontinjensi meliputi pengantar, format pengantar dokumen, dan format dokumen rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi peserta mampu menyusun format penyusunan dokumen rencana kontinjensi dengan baik dan benar.

d. Materi

a) Pengantar

Untuk mendapatkan dokumen rencana kontinjensi yang baik dan benar, diperlukan format penulisan dokumen dengan standar tertentu, terdiri dari Format pengantar dan Format dokumen rencana kontinjensi.

b) Format pengantar

Format pengantar dokumen rencana kontinjensi memuat urutan mulai dari latar belakang, gambaran umum wilayah, potensi kejadian bencana, peraturan dan kelembagaan terkait kebencanaan, identifikasi ancaman bencana di daerah, dan prioritas ancaman bencana yang akan disusun.

c) Format dokumen

Format dokumen rencana kontinjensi memuat urutan mulai dari dasar penyusunan, scenario kejadian bencana, skenario dampak bencana, tujuan penanganan darurat, kebijakan penanganan darurat, strategi penanganan darurat, perencanaan kluster, rencana tindak lanjut, dan penutup.

Rincian sebagai berikut:

A. FORMAT KONSEP DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI

| BAB | SUB BAB | URAIAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kata Pengantar | | |
| Daftar Isi | | |
| I. PENDAHULUAN | A. Latar Belakang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Sasaran 4. Ruang lingkup 5. Sistematika 6. Landasan Hukum 7. Pengertian |
| | B. Gambaran Umum Wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas wilayah 2. Keadaan alam 3. Administrasi pemerintahan 4. Penggunaan lahan 5. Iklim dan hidrologi 6. Geologi 7. Lain-lain |
| | C. Kejadian Bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah kebencanaan 2. Kejadian bencana |
| | D. Peraturan Kelembagaan terkait Kebencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah 2. Peraturan kepala daerah 3. Peraturan dan kebijakan lain 4. Kelembagaan |
| | E. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pemangku kepentingan 2. Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana 3. Penanganan, perlindungan dan partisipasi disabilitas dalam penanggulangan bencana |
| II. IDENTIFIKASI ANCAMAN BENCANA DAN PRIORITAS ANCAMAN BENCANA YANG AKAN DISUSUN DALAM RENCANA KONTINJENSI | A. Identifikasi ancaman bencana di daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian bencana di daerah 2. Potensi ancaman bencana |
| | B. Prioritas ancaman bencana yang akan disusun dalam rencana kontinjensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian risiko 2. Penentuan kejadian |
| II. PENUTUP | | |

B. FORMAT DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI

| BAB | SUB BAB | KETERANGAN |
|----------------|---------|------------|
| KATA PENGANTAR | | |
| DAFTAR ISI | | |
| I. PENGANTAR | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. SKENARIO KEJADIAN BENCANA DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA | A. Skenario Kejadian Bencana | 1. Waktu kejadian 2. Lokasi ancaman 3. Luasan wilayah terdampak 4. Intensitas bencana 5. Durasi kejadian bencana 6. Potensi bencana ikutan (<i>collateral</i>) |
| | B. Asumsi Dampak Bencana | 1. Aspek Kependudukan 2. Aspek Sarana dan Prasarana 3. Aspek Sosial Ekonomi 4. Aspek Ekonomi 5. Aspek Lingkungan |
| III. PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT | A. Tujuan penanganan darurat B. Kebijakan penanganan darurat C. Strategi penanganan darurat | |
| IV. PERENCANAAN BIDANG OPERASI | A. Pendahuluan B. Pos Komando C. Sub Bidang Pencarian dan Penyelamatan D. Sub Bidang Kesehatan E. Sub Bidang Pengungsian F. Sub Bidang lainnya sesuai dengan pengaturan | |
| V. RENCANA TINDAK LANJUT | A. Latihan kesiapsiagaan/gladi dan simulasi B. Diseminasi C. Prosedur aktivasi D. Prosedur kaji ulang E. Penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi F. Prosedur formalisasi/legalisasi | |
| VI. PENUTUP | | |

e. Diskusi Kelas

Fasilitator menyiapkan daftar pertanyaan dalam diskusi kelas:

- a) Jelaskan tahapan sebelumnya
- b) Jelaskan konsep penyusunan dokumen rencana kontinjensi.
- c) Jelaskan apa tahapan penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

f. Jumlah JP

Pengantar Penyusunan Rencana Kontinjensi, 2 JP (@ 45 menit) = 90 menit

(F).Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

14. Sub Materi Pokok - Skenario Kejadian Bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang pengertian skenario, peran skenario dan jenis-jenis skenario kejadian bencana dalam penyusunan rencana kontinjensi, serta cara penyusunan skenario kejadian bencana. Skenario merupakan alat untuk mengeksplorasi, menggambarkan dan menganalisis sejauh mana suatu kemungkinan kejadian kedaruratan. Pengembangan skenario kejadian bencana merupakan suatu narasi deskriptif yang menjelaskan hasil penelitian para ilmuwan/ahli/narasumber berkompeten dibidangnya maupun berdasarkan RPB dan peta risiko bencana di suatu daerah.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian scenario dan peran scenario, untuk menyusun jenis-jenis skenario kejadian bencana dan pengembangan skenario kejadian bencana untuk mendukung penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu :

- a) Menyusun jenis-jenis skenario kejadian bencana.
- b) Menentukan suatu skenario kejadian bencana yang paling mungkin terjadi yang disepakati bersama sebagai dasar penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

d. Materi

- a) Pengertian skenario, peran skenario dan jenis-jenis skenario dalam penyusunan rencana kontinjensi.
 - (1) Skenario merupakan alat untuk mengeksplorasi, menggambarkan dan menganalisis sejauh mana suatu kemungkinan kejadian kedaruratan.
 - (2) Skenario harus realistis. Ada dua jenis skenario yang biasanya dibuat yaitu kejadian yang paling mungkin terjadi dan yang paling berat berdasarkan kesejarahan setempat.
- b) Pengembangan skenario kejadian bencana.
 - (1) Pengembangan skenario kejadian bencana merupakan suatu narasi deskriptif yang menjelaskan hasil penelitian para ilmuwan/ahli/narasumber berkompeten

maupun berdasarkan RPB dan peta risiko bencana di suatu daerah.

- (2) Untuk mendapatkan skenario yang paling mungkin terjadi dan mendekati realistik, serta berdasarkan data ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan (scientific), dan potensi bencana data terkini, maka pengembangan skenario kejadian bencana difasilitasi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Misalnya pengembangan skenario untuk ancaman bencana gempa bumi dan tsunami dengan narasumber dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Jelaskan pengertian skenario, peran skenario dan jenis-jenis skenario dalam penyusunan rencana kontinjensi.
- b) Jelaskan fungsi skenario dalam penyusunan rencana kontinjensi
- c) Kembangkan sebuah skenario kejadian bencana dengan mempertimbangkan : bagaimana awal kejadiannya, mulai dari gejala-gejala peringatan dini, siaga darurat, penanganan darurat bencana. Skenario waktu kejadian, intensitas bencana, durasi kejadian bencana yang dihitung atas dasar lokasi ancaman, luasan wilayah terdampak, potensi bencana ikutan (*collateral*).

f. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6 JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

15. Sub Materi Pokok - Asumsi Dampak Bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan cara pengembangan berbagai **asumsi dampak bencana** berdasarkan skenario kejadian bencana yang telah ditentukan dengan pendekatan ilmiah. Pengembangan asumsi membantu mengeksplorasi implikasi dari bahaya atau ancaman serta dampaknya terhadap populasi. Asumsi sebagai alat untuk mengeksplorasi, menggambarkan dan menganalisis sejauh mana suatu kemungkinan darurat.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian Asumsi dan Perannya dalam Penyusunan Skenario, serta menyusun asumsi dampak bencana dan pengembangannya untuk mendukung penyusunan dokumen

rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu :

- a) Mengembangkan berbagai asumsi dampak bencana berdasarkan risiko bencana yang telah ditentukan.
- b) Menentukan dan menyusun suatu asumsi dampak bencana yang disepakati bersama sebagai dasar perencanaan kontinjensi.

d. Materi

Penyampaian Materi

a) Pengertian Asumsi dan Perannya dalam Penyusunan Skenario

Apa skenario, peran skenario dalam rencana kontinjensi, jenis-jenis skenario dan unsur-unsur pengubah yang menjadi penentu tampilan suatu bencana yaitu satu atau gabungan dari dimensi ruang, waktu, dan proses kejadian. Berdasarkan unsur-unsur pengubah tersebut, tampilan bencana berbeda menjadi kejadian yang paling buruk, paling ringan, dan sedang.

b) Pengembangan Asumsi Dampak Bencana

- (1) Pengembangan skenario dilakukan untuk membantu mengeksplorasi implikasi dari bahaya atau ancaman serta dampaknya terhadap populasi. Skenario adalah alat untuk mengeksplorasi, menggambarkan dan menganalisis sejauh mana suatu kemungkinan darurat.
- (2) Unsur pengubah adalah suatu konsep penentu tampilan dari bencana. Satu ancaman bencana yang bertemu unsur pengubah berbeda, akan menimbulkan dampak berbeda. Dengan menggunakan unsur pengubah kelompok menggambarkan bagaimana suatu ancaman bencana dapat menjadi bencana yang berbeda skala dan keganasan nya.
- (3) Tampilan bencana yang dimunculkan secara berbeda menjadi dasar penentuan tampilan mana yang paling buruk, paling ringan, paling mungkin terjadi.
- (4) Pengembangan asumsi dampak, menjelaskan mengenai perkiraan asumsi dampak yang diperkirakan akan terjadi terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan dalam masa penanganan darurat bencana. Pengembangan asumsi dampak menjelaskan perkiraan asumsi dampak yang diperkirakan akan terjadi terhadap

aspek-aspek sarana dan prasarana.

- (5) Pengembangan asumsi dampak harus mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas lokal masyarakat yang terkena dampak bencana antara lain pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Memperhitungkan asumsi dampak terhadap gender dan penyandang disabilitas.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Kembangkan asumsi dampak sebuah bencana dengan menggambarkan asumsi dampak bencana ditinjau dari :
- (1) Daerah yang terdampak (kecamatan, desa/kelurahan)
 - (2) Jumlah populasi terdampak, persentase jiwa yang Terancam :
 - (a) Meninggal
 - (b) Hilang
 - (c) Luka-luka
 - (d) Mengungsi
 - (e) Pindah
- b) **Asumsi dampak aspek**
- a) Sarana dan prasarana
 - b) Perekonomian
 - c) Lingkungan
 - d) Pemerintahan

9) Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

16. Sub Materi Pokok - Aturan Kerangka Kerja Penanganan darurat

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan tentang :

- a) Dasar hukum dan nilai-nilai dalam penanganan darurat bencana
- b) Penentuan masa berlaku penanganan darurat termasuk di dalamnya dasar penentuan, pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat, dan mekanisme aktivasi operasi kedaruratan.

b. Hasil Belajar

- a) Mengidentifikasi dasar hukum, nilai-nilai dalam tanggap darurat/ penanganan darurat bencana, baik lokal, nasional, regional dan universal.
- b) Menyusun prinsip-prinsip kedaruratan.
- c) Menyusun tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat secara konseptual.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi diklat, peserta mampu menentukan dasar hukum, nilai-nilai dalam penanganan darurat bencana, baik lokal, nasional, regional dan universal, serta memahami prinsip-prinsip kedaruratan serta tujuan, kebijakan dan strategi secara konseptual.

d. Materi

- a) Aturan kerangka kerja penanganan darurat

Dasar hukum, nilai, sebagai dasar untuk menyusun tujuan, kebijakan dan strategi tanggap darurat. Prinsip dasar dan game-rule yang menentukan gerak penanganan darurat. Unsur "nilai" penting dalam penanganan darurat dengan memperhatikan hierarki nilai global (HAM, *humanity*, hukum pengungsian), nasional, dan lokal yang formal dan mengikat secara hukum. Nilai-nilai dan prinsip harus mempertimbangkan pengarusutamaan gender, *gender Checklist*, kebutuhan khusus gender dan penyandang disabilitas sesuai jenis disabilitasnya.

- b) Prinsip-prinsip kedaruratan

Dalam situasi darurat diperlukan tindakan segera untuk pemulihan keadaan agar kembali pulih dalam waktu segera, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Prioritas utama adalah penyelamatan jiwa manusia.

e. Diskusi kelas

- a) Apakah yang dimaksud dengan kerangka kerja penanganan darurat?
- b) Apa saja aturan kerangka kerja yang berlaku dalam hukum positif Indonesia dan apa pula yang terdapat dalam instrument regional/ internasional?

- c) Jelaskan nilai-nilai dan prinsip pengarusutamaan gender, *gender Checklist*, kebutuhan khusus gender.
- d) Jelaskan nilai-nilai dan prinsip Washington group checklist untuk disabilitas, dan perlindungan penyandang disabilitas sesuai jenis disabilitasnya.

f. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6 JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

17. Sub Materi Pokok - Teknik Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penanganan darurat

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan tentang konsep dan kerangka berpikir dalam mengembangkan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana berdasarkan uraian skenario kejadian dan asumsi dampak yang telah disusun tahap sebelumnya dengan merujuk pada aturan kerangka kerja penanganan darurat.

- a) Tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat
- b) Prinsip-prinsip kedaruratan.
- c) Tujuan secara umum yang akan dicapai oleh masing-masing bidang dalam penanganan darurat.
- d) Kebijakan yang diterapkan pada masa penanganan darurat.
- e) Strategi yang akan diterapkan dalam penanganan darurat.

Kebijakan dan strategi penanganan darurat wajib menggunakan analisis gender (Gender Analysis Pathway), *gender Checklist*, dan disabilitas *Checklist* dalam Washington group *Checklist* untuk penyandang disabilitas, serta memasukkan potensi yang dimiliki lembaga usaha.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu menjelaskan konsep tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat, analisa gender, penyandang disabilitas, peran lembaga usaha, kerangka Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan darurat bencana, penentuan Masa Penanganan darurat (Status Siaga Darurat, Status Penanganan Darurat Bencana, Transisi Darurat Ke Pemulihan), untuk menyusun tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat dalam dokumen rencana kontinjensi sesuai aturan.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu menyusun kerangka kerja meliputi tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana.

d. Materi

- a) Konsep tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana
Tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat dibahas pada tahap sebelum pekerjaan perencanaan bidang operasi, dengan tujuan untuk membebaskan dari pengaruh dan kepentingan sektoral.
Merupakan prinsip *emergency respons* atau menanggapi keadaan saat penanganan darurat sesuai dengan skenario kejadian bencana dan asumsi dampak bencana yang telah ditetapkan. Merupakan prinsip dasar dan game-rule yang menentukan gerak penanganan darurat. Unsur "nilai" penting dalam penanganan darurat dengan memperhatikan hierarki nilai global (HAM, *humanity*, hukum pengungsian), nasional, dan lokal yang formal dan mengikat secara hukum.
- b) Penjelasan mengenai perbedaan Gender dan Jenis Kelamin, Gender Analysis (GAP : *Gender Analysis Pathway*), Gender *Checklist*, Washington group *Checklist* untuk disabilitas, Kebutuhan khusus gender, fokus kepada kapasitas tidak hanya pada kerentanan gender.
- c) Pengarusutamaan gender saat **pra bencana**, memperhatikan kajian risiko bencana tentang perbedaan dalam tingkat penerimaan risiko antara laki-laki dan perempuan, memperhatikan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan, identifikasi dan penilaian kapasitas responsif gender, peringatan dini responsif gender serta mitigasi dan kesiapsiagaan bencana responsif gender.
- d) Pengarusutamaan gender saat **Penanganan Darurat**, memperhatikan responsif gender dilaksanakan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana Penanganan Darurat Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar saat Penanganan Darurat Bencana, bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki-laki dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya, penampungan dan hunian sementara dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang, layanan kesehatan mudah diakses oleh perempuan, laki-laki dan anak-anak, layanan psikososial melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam pengumpulan data, perencanaan dan pelaksanaan.

- e) Penyandang Disabilitas **saat Pra Bencana**, sistem peringatan dini wajib menjangkau penyandang disabilitas secara tepat waktu, akurat dan melalui media yang sesuai dg jenis serta derajat disabilitas. Setiap rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas wajib memiliki rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga.
- f) Penyandang Disabilitas **Saat Penanganan Darurat Bencana**, fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk kegiatan rumah tangga utama dan pendampingan psikososial bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas. Alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas.
- g) **Lembaga Usaha** dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak penanggulangan bencana melalui:
 - a) Pelibatan dalam penyusunan kegiatan
 - b) Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan
 - c) Penyampaian umpan balik
 - d) Peningkatan kapasitas bersama
 - e) Kegiatan berbagi kapasitas
- h) Kerangka Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan darurat bencana
Dalam situasi darurat bencana, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan penanganan darurat. Pentingnya melaksanakan tugas menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa dan meluasnya dampak bencana.
Penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/ sarana vital untuk berfungsinya pelayanan publik secepatnya. Kebijakan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi Penanganan Darurat Bencana, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, social, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat.
- i) Hubungan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat Bencana
Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai. Kebijakan penanganan darurat merupakan produk politis pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan tujuan yang akan dicapai dalam

pelaksanaan penanganan darurat. Strategi penanganan darurat bencana adalah cara atau upaya untuk mencapai kebijakan penanganan darurat yang telah ditetapkan.

j) Penentuan Masa Penanganan darurat

Ketika situasi darurat bencana terjadi, perlu penetapan status masa penanganan darurat oleh kepala daerah sebagai bagian dari kebijakan.

(1) Status Siaga Darurat

Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan dimana terdapat potensi bencana, yang digambarkan dengan peningkatan eskalasi ancaman.

(2) Status Penanganan Darurat Bencana

Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

(3) Transisi Darurat Ke Pemulihan.

Status Transisi darurat bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang, dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi kembali secara darurat.

e. Diskusi kelas

- a) Jelaskan seperangkat nilai (filosofis, konstitusional, legislasi, normatif, teknis, dll) untuk menjadi kebijakan dasar penanganan darurat.
- b) Mengapa kebijakan dan strategi penanganan darurat perlu memperhatikan aspek
 - (1) tanggungjawab pemerintah;
 - (2) hak masyarakat terkena bencana, memperhatikan gender dan penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya.
 - (3) koordinasi lintas sektor/kluster;
 - (4) hubungan dan bantuan internasional,
- c) Prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar.
- d) Konsep tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana
- e) Mengapa memperhatikan perbedaan Gender dan Jenis Kelamin, Gender Analysis (GAP : Gender Analysis Pathway), Gender Checklist, Washington group Checklist untuk disabilitas, Kebutuhan khusus gender, fokus kepada kapasitas tidak hanya

pada kerentanan gender.

- f) Mengapa perlu memperhatikan penyandang Disabilitas Saat Pra Bencana, dan Penyandang Disabilitas Saat Penanganan Darurat Bencana,
- g) Jelaskan peran **Lembaga Usaha** dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak penanggulangan bencana melalui:
- h) Kerangka Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan darurat bencana
- i) Perlunya penentuan Masa Penanganan darurat
 - (1) Status Siaga Darurat
 - (2) Status Penanganan Darurat Bencana
 - (3) Transisi Darurat Ke Pemulihan

f. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6 JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

18. Sub Materi Pokok - Rencana Bidang Operasi Penanganan Darurat

Situasi, Sasaran, Kegiatan

a. Deskripsi Singkat

Perencanaan Bidang Operasi

Materi ini membekali peserta menjelaskan dasar pembentukan bidang operasi, ruang lingkup perencanaan bidang yang meliputi situasi, sasaran dan kegiatan, serta kerja-kerja pada saat penanganan darurat melalui pembagian bidang operasi. Pada tahap ini menjabarkan cara penyusunan bidang kerja beserta kegiatan-kegiatan bidang dalam situasi darurat, dengan perumusan kegiatan berdasarkan tugas, kebutuhan, standard minimum dan prosedur masing-masing bidang operasi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu menjelaskan sistem peringatan dini di masyarakat, diseminasi informasi dan komunikasi, penanganan Disabilitas, penentuan jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian, penentuan letak Pos Komando, Pos Komando Lapangan, dan Pos Pendukung, konsep sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), perencanaan Bidang–Bidang Operasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, serta format Perencanaan Bidang operasi, dalam menyusun rencana bidang-bidang operasi penanganan darurat bencana meliputi situasi, sasaran dan kegiatan, serta kerja-kerja pada saat penanganan darurat melalui pembagian

bidang operasi. Perumusan kegiatan berdasarkan tugas, kebutuhan, standard minimum dan prosedur masing-masing bidang operasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu menyusun rencana bidang-bidang operasi penanganan darurat bencana meliputi situasi, sasaran dan kegiatan, serta kerja-kerja pada saat penanganan darurat melalui pembagian bidang operasi. Perumusan kegiatan berdasarkan tugas, kebutuhan, standard minimum dan prosedur masing-masing bidang operasi.

d. Materi

a) Peringatan Dini

1) Sistem peringatan dini di masyarakat

Tanda kejadian bencana – gejala alam - dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyebaran peringatan dini setelah melalui proses pemantuan dan deteksi bencana, dan dilakukan analisis singkat atas gejala-gejala yang ditimbulkan untuk menghasilkan rekomendasi keputusan peringatan yang akan dikeluarkan.

2) Diseminasi informasi dan komunikasi

Pengorganisasian peringatan dini (pada tingkat masyarakat harus dibentuk kelompok peringatan dini – atau KSB - yang bertanggungjawab untuk melakukan proses pemantuan gejala alam, analisis serta mengeluarkan peringatan dini dan pelaporan)

3) Penanganan Disabilitas

Penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi secara efektif jika tidak didukung terlebih dahulu/sebelumnya. *Capacity building* diperlukan sebelum memulai proses evakuasi. Tanpa partisipasi yang aktif dan effectif dari orang dengan disabilitas, maka kesiapsiagaan masyarakat tidak inklusif. Dalam pemetaan masyarakat terdampak, perlu dimasukkan pendamping atau *caregiver* dalam perencanaan. Perlu selalu mengupayakan menghapus barrier atau hambatan dalam semua upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

b) Penentuan jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian, penentuan letak Pos Komando, Pos Komando Lapangan, dan Pos Pendukung.

Sebelum perencanaan masing-masing bidang dan sub bidang dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, perlu ditentukan rencana jalur-jalur evakuasi atau jalur pengungsian untuk penyelamatan diri masyarakat dari lokasi atau daerah bencana, ke daerah-daerah yang aman. Direncanakan titik-titik atau tempat pengungsian di beberapa tempat dengan kapasitas tempat pengungsian disesuaikan dengan skenario jumlah penduduk yang akan mengungsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Organisasi sistem komando penanganan darurat (SKPDB) atau Pos Komando, perlu ditentukan letak atau lokasinya.

c) Konsep sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)

Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, adalah **satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.**

d) Perencanaan Bidang–Bidang Operasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Perencanaan dilakukan mendukung terlaksananya fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang terdiri atas fungsi Komandan, fungsi Wakil Komando, fungsi Bidang Perencanaan, fungsi Bidang Sekretariat, fungsi Bidang Data Informasi dan Humas, Fungsi Perwakilan Lembaga, Fungsi Operasi, Fungsi Pos Lapangan, fungsi Pos Pendukung dan fungsi Pos Pendamping.

e) Format Perencanaan Bidang operasi

Merumuskan situasi yang dihadapi setiap bidang operasi dan merumuskan sasaran yang merupakan *break down* dari strategi penanganan darurat sesuai bidang operasinya. Dari rumusan sasaran, diturunkan lagi dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan relevan dengan bidang operasi. Setelah itu diidentifikasi lembaga atau instansi yang potensial dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya disepakati siapa bertanggungjawab dalam mengkoordinasi kegiatan tersebut. Ditentukan waktu dimulai kegiatan tersebut dan kapan akan berakhir serta durasinya.

f) Situasi Bidang operasi

Situasi bidang operasi adalah kondisi atau situasi spesifik yang dihadapi masing-masing bidang operasi sesuai dengan nama bidang operasinya.

g) Sasaran Bidang operasi

Dari situasi selanjutnya dibandingkan dengan kebijakan dan strategi penanganan darurat untuk merumuskan sasaran. Sasaran adalah bentuk lain dari pernyataan tujuan di tingkat bidang operasi. Sasaran-sasaran akan menjadi target yang ingin dicapai masing-masing bidang operasi.

h) Kegiatan Bidang operasi

Untuk mencapai sasaran bidang operasi, dilakukan identifikasi kegiatan yang diperlukan dalam penanganan darurat antara lain pencarian dan penyelamatan, dapur umum, perlindungan, layanan kesehatan, air bersih, Pos Komando koordinasi dan manajemen, dll.

i) Pelaku/Pelaksana Kegiatan

- (1) Mengidentifikasi seluruh pelaku kegiatan penanganan darurat berdasarkan kegiatan yang ada dalam kapasitas para pihak. Pelaku ditentukan oleh peserta penyusun rencana kontinjensi, yang selanjutnya dikelompokkan dalam bidang operasi masing-masing.
- (2) Analisa kapasitas dilakukan untuk perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas sebab tidak menutup kemungkinan mereka memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.
- (3) Perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama sesuai keahlian dan kemampuan yang mereka miliki untuk berperan aktif dalam penanganan darurat bencana dan menjadi bagian dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Dalam rangka pemberian bantuan, Lembaga Usaha harus melaporkan identitasnya serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD.
- (5) BNPB dan BPBD melakukan pengawasan terhadap peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

j) Penanggung jawab

Ditentukan penanggung jawab bidang operasi dan sub bidang-sub bidangnya (misalnya sub bidang SAR, sub bidang kesehatan, sub bidang manajemen shelter,

dll) untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan penanganan darurat bencana dalam sistem komando penanganan darurat bencana.

k) Waktu pelaksanaan dan durasi

Waktu pelaksanaan kegiatan oleh bidang operasi:

- (1) Sebelum atau menjelang kejadian bencana
- (2) Sesaat setelah terjadi bencana, contoh SAR, kaji cepat.
- (3) Selama masa penanganan darurat, contoh bidang operasi kesehatan, bidang operasi social, bidang operasi sarana dan prasarana.
- (4) Sesaat setelah bencana, seluruh bidang operasi.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Sebelum penyusunan rencana bidang operasi, mengapa perlu penentuan jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian, penentuan letak Pos Komando, Pos Komando Lapangan, dan Pos Pendukung.
- b) Jelaskan Konsep sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
- c) Bagaimana pola Perencanaan Bidang–Bidang dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- d) Jelaskan Format Perencanaan Bidang operasi.

f. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam penanganan darurat berdasarkan kegiatan yang telah dikembangkan, berbasis standar minimum dan batasan pembelanjaan dana siap pakai darurat daerah/dana tak terduga.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu menyusun dokumen rencana kontinjensi dengan memperhatikan proyeksi Kebutuhan sumberdaya, Perka BNPB No. 7 Th. 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, standar Minimum Penanganan Darurat, *Sphere Project*-Standar, Penanganan darurat memperhatikan responsif gender,

Penanganan darurat bagi penyandang disabilitas

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu

- 1) Memproyeksikan kebutuhan sumber daya
- 2) Menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya Penanganan Darurat Bencana
- 3) Menyusun persyaratan standar minimum penanganan darurat yang berlaku.

d. Materi

a) **Proyeksi Kebutuhan**

Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan missal prasarana (bangunan, gudang, lapangan, pelabuhan dll), atau sarana (ambulans, truk, alat berat dll.) atau personil (dokter, perawat, relawan, pasukan dll), serta obat-obatan, pangan, air bersih, ambulance, tempat penampungan, pembalut wanita, selimut, dll. Semua tentukan jumlahnya, kapasitasnya dan ketersediaannya. Proyeksi kebutuhan berdasarkan hasil GAP (Gender Analysis Parthway), *Checklist* gender, Washington *Checklist* untuk disabilitas dan analisis kapasitas penyandang disabilitas dalam situasi darurat bencana.

b) **Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.**

Pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar antara lain cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan, prioritas pemberian bantuan harus diutamakan kepada kelompok rentan, serta koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Jenis bantuan tempat penampungan/hunian sementara, pangan, non pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan.

c) **Standar Minimum Penanganan Darurat**

Penyusunan kebutuhan bidang operasi digunakan untuk penanganan darurat dengan mengacu pada **standar pelayanan minimum** yang ditetapkan oleh bidang operasi-bidang operasi terkait.

d) ***Sphere Project*-Standar Pemenuhan Kebutuhan Minimum Kedaruratan**

Apabila di dalam standar tingkat nasional tidak atau belum ada, maka dapat dipakai standar internasional seperti *standar Sphere*. Merupakan pernyataan praktis dari asas-asas dan hak-hak seperti terkandung dalam Piagam Kemanusiaan, berkaitan dengan persyaratan paling mendasar untuk mendukung kehidupan dan martabat korban bencana.

- e) **Penanganan darurat** memperhatikan **responsif gender** dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana Penanganan Darurat Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar anatara lain bantuan pangan, penampungan dan hunian sementara, serta layanan kesehatan dan psikososial melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam pengumpulan data, perencanaan dan pelaksanaan.
- f) **Penanganan darurat** bagi **penyandang disabilitas**, dengan fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk kegiatan rumah tangga utama dan pendampingan psikososial disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas. Alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dg jenis dan derajat disabilitas.

e. **Diskusi Kelas**

- a) Mengapa perlu dibentuk bidang operasi.
- b) Mengidentifikasi kebutuhan yang timbul dari kegiatan dengan menggunakan indeks konversi dan parameter baseline, menentukan besaran kuantitatif kebutuhan, juga harus mendaftar kebutuhan yang bersifat normatif, kualitatif dan prosedural.
- c) Jelaskan Proyeksi Kebutuhan sumberdaya dengan mengidentifikasi sumberdaya yang dibutuhkan dalam penanganan darurat.
- d) Jelaskan Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- e) Mengapa perlu Standar Minimum Penanganan Darurat
- f) Apa pula *Sphere Project* - Standar Pemenuhan Kebutuhan Minimum Kedaruratan
- g) Mengapa Penanganan darurat memperhatikan responsif gender dan Penanganan darurat bagi penyandang disabilitas.

f. **Jumlah JP**

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6 JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

Ketersediaan Sumber daya

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjabarkan tentang cara mengidentifikasi potensi sumber daya untuk penanganan darurat, identifikasi lokasi ketersediaan sumber daya dan pengerahan sumberdaya kolektif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ketersediaan sumberdaya, identifikasi Potensi Penanganan darurat, Pengerahan Sumber Daya Kolektif, keikutsertaan Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana, dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu :

- a) Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah untuk mendukung kegiatan kegiatan penanganan darurat bencana dengan mengacu pada fungsi–fungsi yang dijalankan oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- b) menyusun dan menilai kemampuan, kapasitas sumberdaya (manusia, peralatan/sarana dan prasarana) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kegiatan bidang saat penanganan darurat
- c) Menjelaskan penilaian kemampuan dan kapasitas sumber daya (manusia, peralatan/sarana dan prasarana) yang dapat di mobilisasi untuk mendukung kegiatan bidang operasi saat penanganan darurat.

d. Materi

Salah satu fungsi terpenting dari perencanaan kontinjensi adalah pengerahan sumber daya penanganan darurat sesuai dengan kebutuhan darurat yang telah ditetapkan bersama untuk masing-masing bidang operasi.

e. Penyampaian Materi

a) Ketersediaan Sumberdaya

Dari proses identifikasi kegiatan, perlu dilakukan penilaian terhadap kebutuhan, ketersediaan, dan kesenjangan ketersediaan sumber daya di masing-masing bidang operasi. Penilaian sumber daya pada setiap Sub Bidang dalam Bidang operasi mengacu pada aturan yang berlaku baik nasional maupun internasional, atau standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh bidang operasi terkait.

b) Identifikasi Potensi Penanganan darurat

Pentingnya identifikasi potensi sumber daya yang akan di mobilisasi berbasis pada kebutuhan yang telah diidentifikasi pada sesisebelumnya untuk mendukung kegiatan penanganan darurat bencana dengan mengacu pada fungsi–fungsi yang dijalankan oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Analisis sumberdaya dilakukan untuk memastikan sumberdaya tersedia agar fungsi-fungsi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dapat berjalan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi komandan, fungsi wakil komandan, fungsi bidang perencanaan, fungsi bidang sekretariat, fungsi bidang data informasi dan humas, fungsi perwakilan lembaga, fungsi bidang operasi, fungsi pos komando, fungsi pos lapangan, fungsi pos pendukung, dan fungsi pos pendamping.

Berbasis pada daftar kebutuhan yang telah dibuat pada sesi sebelumnya, perlu diidentifikasi kuantitas dan dinilai ketersediaan sumber daya masing-masing bidang dalam SKPDB, baik berupa SDM, Peralatan, Obat-obatan, Pangan, Non-Pangan, Sarana & Prasarana dll. Ketersediaan ini bisa bersumber dari berbagai pihak yang ditekankan pada sumber daya yang ada didaerah.

c) Pengerahan Sumber Daya Kolektif

Saat penghitungan kuantitas (lebih maupun kekurangan dari yang dibutuhkan) dan identifikasi instansi sebagai lokasi ketersediaan kebutuhan sumber daya, dari perwakilan instansi yang terlibat dalam penyusunan rencana kontinjensi. Berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah yang bisa dikerahkan sebagai sumber daya kolektif untuk penanganan darurat bencana. Menandai masing-masing sumber daya sebagai:

- a) langsung tersedia,
- b) dapat digerakkan dalam jangka waktu tertentu, atau
- c) dapat digerakkan tetapi melalui prosedur tertentu.

d) Lembaga Usaha

- (1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat memberikan bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD.
- (2) Bantuan pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

(3) Kegiatan:

- (a) Pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda.
- (b) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (c) Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan.
- (d) Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital
- (e) Kegiatan lain yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana.

f. Diskusi Kelas

- a) Jelaskan ketersediaan Sumberdaya dalam penanganan darurat bencana
- b) Jelaskan Identifikasi Potensi Penanganan darurat
- c) Jelaskan Pengerahan Sumber Daya Kolektif
- d) Mengapa Lembaga Usaha perlu dalam ketersediaan sumberdaya
- e) Jelaskan ketersediaan sumberdaya yang langsung tersedia, dapat digerakkan dalam jangka waktu tertentu, serta dapat digerakkan tetapi melalui prosedur tertentu.

g. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6 JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

a. Kesenjangan Sumberdaya

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan tentang cara menganalisis kesenjangan antara ketersediaan sumberdaya dan kebutuhan sumberdaya, pembentukan bidang penanggap dan rencana masing-masing unit kerja SKPDB.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan sumberdaya, menganalisis kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya, peran lembaga usaha dalam kesenjangan sumberdaya, serta alternatif strategi pemenuhan kesenjangan sumberdaya dalam menyusun dokumen rencana kontinjensi.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu :

- 1) Mengidentifikasi kesenjangan sumberdaya
- 2) Menganalisis kesenjangan sumberdaya
- 3) Mengidentifikasi alternatif strategi pemenuhan untuk kesenjangan sumberdaya.

d. Materi

Merupakan sesi terpenting untuk menentukan pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh siapa. Ditekankan cara analisis mempengaruhi komitmen para penanggung bencana.

a) Identifikasi kesenjangan sumberdaya

Identifikasi kesenjangan sumberdaya merupakan gap antara kebutuhan sumberdaya yang diperlukan saat penanganan darurat bencana, disandingkan dengan ketersediaan sumberdaya yang ada di daerah tersebut dimana bencana terjadi. Berbagai sumberdaya antara lain SDM, Peralatan, Obat-obatan, Pangan, Non-Pangan, Sarana & Prasarana dll. Sumberdaya Manusia antara lain tenaga dokter, perawat, relawan, pasukan, prasarana antara lain gudang, pelabuhan, lapangan, gedung, sarana antara lain ambulance, truk, alat berat, alat komunikasi. Bahan antara lain beras, obat-obatan, sandang. Personil yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah, termasuk personil internasional jika dibutuhkan (dokter, perawat, relawan, pasukan).

b) Analisis kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya

Dalam merumuskan proyeksi kebutuhan, ketersediaan akan berujung pada apakah akan memunculkan kesenjangan atau tidak. Kesenjangan muncul apabila sumberdaya yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya/ kualitas kurang. Perencanaan kontinjensi harus mampu menganalisis hal ini dan berusaha mengidentifikasi alternative dan strategi pemenuhannya.

c) Peran lembaga usaha dalam kesenjangan sumberdaya

Pada saat penanganan darurat, lembaga usaha dengan kapasitas dan kompetensi personel dan infrastruktur yang dimiliki dapat mengambil peran pencarian dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar dasar lain air bersih, sanitasi, sandang, hunian, kesehatan, pemulihan awal sarana dasar seperti jembatan, listrik, telekomunikasi, pasar, sarana air, instalasi serta kegiatan teknis lainnya.

d) Alternatif strategi pemenuhan kesenjangan sumberdaya

Rencana masing-masing unit kerja dikoordinasikan dan harmonisasi dengan seluruh bidang operasi penanganan darurat. Sumber daya yang ada (lokal) atau di wilayah sekitar perlu diutamakan. Kesenjangan sumber daya yang muncul pada tiap bidang operasi dapat dipenuhi dengan menggunakan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Menggunakan sumber daya/potensi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- (b) Bantuan dari lembaga usaha/swasta.
- (c) Sumber daya / potensi daerah (kabupaten/kota) yang berdekatan.
- (d) Sumber daya / potensi dari level pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi/nasional).
- (e) Kerja sama dengan berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah, bisa berbentuk Memorandum of Understanding (MoU), *stand-by contract*, meminjam, atau kerja sama dalam bentuk lain.
- (f) Bantuan masyarakat internasional yang sah dan tidak mengikat (bersifat melengkapi).
- (g) Tidak berupa pembelian/pengadaan kecuali pemenuhan kebutuhan dasar.
- (h) Melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia (perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas) yang memiliki pengetahuan dan keahlian dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana agar dapat berperan aktif dan menjadi bagian dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (i) Potensi sumberdaya yang dimiliki lembaga usaha di daerah dimasukkan dalam ketersediaan sumberdaya kolektif.

e. Diskusi Kelas

- a) Jelaskan analisis kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya.
- b) Jelaskan menggunakan sumberdaya/potensi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- c) Jelaskan bantuan dari lembaga usaha/swasta.
- d) Jelaskan Sumber daya / potensi daerah (kabupaten/kota) yang berdekatan.
- e) Jelaskan Sumber daya / potensi dari level pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi/nasional).
- f) Jelaskan Kerja sama dengan berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun
- g) Jelaskan Bantuan masyarakat internasional yang sah dan tidak mengikat (bersifat melengkapi).
- h) Mengapa tidak berupa pembelian/pengadaan.

f. Jumlah JP

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, 6JP (1 JP @ 45 menit) = 270 menit.

(G) Sub Materi Pokok : Simulasi Draft Rencana Kontinjensi

19. Uji Draft Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang rencana kontinjensi sebagai piranti koordinasi berbagai pihak dalam penanganan darurat bencana serta perlu untuk dilakukan suatu simulasi, yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya kekurangan maupun ketidak tepatan draft rencana kontinjensi tersebut apabila dilaksanakan dilapangan, dan sebagai alat kaji sebelum kejadian bencana terjadi. Proses menguji draft rencana kontinjensi dapat dilakukan dengan metode melalui simulasi rapat koordinasi darurat FORKOPINDA. Gladi Ruang *Table Top Exercise* (TTX), Gladi Pos Komando (CPX atau *Command Post Exercise*), dan Gladi i Lapang (FTX atau *Field Training Exercise*)

b. Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi, peserta diharapkan mampu:

- 1) Menjelaskan tujuan dan tata cara melaksanakan rapat koordinasi darurat Forkopinda
- 2) Menjelaskan tujuan dan tata cara melaksanakan kegiatan Gladi Ruang / *Table Top Exercise* (TTX).
- 3) Menjelaskan tujuan dan tata cara melaksanakan kegiatan Gladi/ Pos Komando (*Command Post Exercise, CPX*)
- 4) Menjelaskan tujuan dan tata cara melaksanakan kegiatan Gladi/ lapang (*Field Training Exercise, FTX*).

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu menjelaskan secara rinci prosedur Uji draft rencana kontinjensi, meliputi simulasi Rapat Koordinasi Darurat, kegiatan Uji Ruang atau *Table Top Exercise* (TTX), kegiatan Uji Pos Komando, serta kegiatan Uji Lapang.

d. Materi

a) Simulasi Rapat Koordinasi Darurat

Simulasi rapat koordinasi tingkat daerah, dengan agenda finalisasi dokumen rencana kontinjensi. Dilakukan paling lama 1x24 jam setelah kejadian bencana. Bertujuan untuk mengoordinasikan kekuatan yang tersedia untuk melakukan Penangan Darurat Bencana, mencari jalan keluar bagi kesenjangan sumberdaya, dan menentukan struktur organisasi PDB.

Sebagai Pimpinan rapat koordinasi adalah peran Bupati/ Walikota/Sekretaris Kabupaten/Sekertaris Kota. Bertujuan untuk mengkoordinasikan kekuatan yang tersedia dan mencari jalan keluar untuk kesenjangan sumber daya untuk melakukan Penangan Darurat Bencana, serta menentukan struktur organisasi PDB. Laporan masing-masing bidang operasi pada rapat koordinasi mengenai kesiapan sumber daya, memastikan sumber daya yang disiapkan tidak tumpang tindih dengan sektor/ instansi/ lembaga lain.

b) Kegiatan Uji Ruang atau *Table Top Exercise (TTX)*

Latihan di dalam ruangan untuk menguji kemampuan para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada aturan berlaku dalam merespons suatu kejadian/bencana. Bertujuan mengidentifikasi peranan, tugas tanggung jawab dinas terkait dalam menghadapi bencana, mengidentifikasi mekanisme koordinasi di lapangan, mengidentifikasi dan menguji standar prosedur yang ada, implementasi mekanisme komando dalam penanganan darurat, bahan masukan pembuatan SOP daerah.

TTX dapat melatih tata cara melaksanakan RAPAT KOMANDO INFORMASI BENCANA sesuai P Planning berdasarkan Perka No. 24/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi. Rapat Komando Informasi Bencana dilakukan setelah kejadian bencana terjadi dan setelah Rapat Koordinasi Darurat Forkopinda. Dipimpin oleh Komandan PDB. Difasilitasi oleh Bidang Perencanaan. Diikuti oleh Komandan, Bidang perencanaan, Bidang Data Informasi, Bidang Operasi

c) Kegiatan Uji Pos Komando (*Command Post Exercise; CPX*)

Latihan di dalam ruangan yang diikuti oleh unsur pimpinan yang memiliki fungsi komando dan staf pelaksana operasional lapangan dari perwakilan masing-masing instansi/lembaga untuk melatih koordinasi baik antar instansi/lembaga/antar bidang. Diharapkan setiap peserta mengetahui/Menjelaskan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang. Pengendali beserta staf/personil sekretariat menyusun :

- (1) Rencana Operasional Uji/gladi Pos Komando, mencakup:
- (2) Tujuan dan Sasaran gladi.
- (3) Tema Gladi.
- (4) Materi Gladi

- (5) Metoda, Sifat dan Ruang Lingkup
- (6) Waktu dan tempat gladi.
- (7) Peserta gladi.
- (8) Dukungan Gladi.

d) Kegiatan Uji Lapang (*Field Training Exercise:FTX*)

Merupakan latihan di lapangan untuk menguji dan mengevaluasi perencanaan, kebijakan dan prosedur, mengidentifikasi kesenjangan sumber daya, memperkuat koordinasi dan komunikasi organisasi, memperjelas peran dan tanggung jawab antar institusi, melatih personal dalam peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan kinerja perorangan. Uji lapang untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana, untuk:

- (1) Menguji dan mengevaluasi perencanaan, kebijakan dan prosedur;
- (2) Mengidentifikasi kesenjangan sumberdaya;
- (3) Memperkuat koordinasi dan komunikasi organisasi;
- (4) Memperjelas peran dan tanggung jawab antar institusi;
- (5) Melatih personal dalam peran dan tanggung jawab;
- (6) Meningkatkan kinerja perorangan

Seluruh kegiatan uji draft rencana kontinjensi diikuti oleh peserta dari seluruh pemangku kepentingan penanganan darurat, termasuk memperhatikan gender, penyandang disabilitas, serta pelibatan lembaga usaha.

e. Diskusi Kelas

Pertanyaan :

- a) Jelaskan tentang simulasi Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana
- b) Jelaskan tentang kegiatan Uji Ruang atau *Table Top Exercise* (TTX)
- c) Jelaskan tentang kegiatan Uji Pos Komando (*Command Post Exercise; CPX*)
- d) Jelaskan tentang kegiatan Uji Lapang (*Field Training Exercise:FTX*)

f. Jumlah JP

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit) = 90 menit.

20. Sub Materi Pokok - Rencana Tindak Lanjut

Setelah draft rencana kontinjensi selesai disusun oleh peserta penyusunan, dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut, meliputi:

- 1) Diseminasi dokumen rencana kontinjensi
- 2) Prosedur aktivasi rencana kontinjensi
- 3) Prosedur kaji ulang rencana kontinjensi
- 4) Menyusun ringkasan dokumen rencana kontinjensi
- 5) Prosedur formalisasi/legalisasi

Penyusunan ringkasan Rencana tindak lanjut bertujuan untuk merencanakan kegiatan lanjutan/langkah kesiapsiagaan, setelah penyusunan rencana kontinjensi selesai dilaksanakan. Menentukan tindakan resmi yang harus diambil untuk menguatkan hasil perencanaan, sehingga mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat. Menentukan penanggung jawab setiap kegiatan dan menentukan jadwal waktu pelaksanaannya.

Diseminasi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta Menjelaskan proses diseminasi rencana kontinjensi melalui penentuan media diseminasi, target sasaran, memotivasi audiens, dampak negatif atau positif, serta perlunya evaluasi proses diseminasi rencana kontinjensi. Diseminasi rencana kontinjensi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat penanggulangan bencana, baik unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta dunia usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman, dan pada akhirnya menerima serta pada waktu terjadi kedaruratan akan melaksanakan pengetahuan rencana kontinjensi tersebut.

b. Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu:

- 1) Menjelaskan target sasaran diseminasi yakni para pengambil kebijakan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk organisasi penyandang disabilitas serta dunia usaha,
- 2) Menjelaskan penentuan media serta memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan dan rekomendasi jalan keluar dari kesenjangan sumberdaya.
- 3) Menjelaskan timbulnya pemahaman yang pada akhirnya menerima serta pada waktu terjadi kedaruratan akan melaksanakan pengetahuan rencana kontinjensi tersebut untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu mensimulasikan draft rencana kontinjensi berupa diseminasi rencana kontinjensi kepada seluruh pihak terkait penanggulangan bencana.

d. Materi

Menjelaskan tujuan pembelajaran proses diseminasi rencana kontinjensi kepada sasaran diseminasi yakni para pengambil kebijakan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk organisasi penyandang disabilitas serta dunia usaha.

Salah satu Metode Diseminasi yang sangat penting dilakukan adalah RAPAT KOORDINASI RENKON. Dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Sekda dan dihadiri oleh para pemimpin instansi/lembaga yang telah diidentifikasi dalam rencana kontinjensi. Rapat Koordinasi Renkon dilakukan sebelum kejadian bencana, sesaat setelah dokumen rencana kontinjensi selesai disusun dan disepakati. Rapat koordinasi Renkon bertujuan untuk melaporkan dan diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada Gubernur/Bupati/Sekda menjelaskan ancaman kerentanan kapasitas terkait ancaman kepada Gubernur/Bupati/Sekda dan para kapal instansi terkait, dan menemukan kesenjangan sumberdaya tersedia disandingkan dengan kebutuhan penanganan darurat bencana menemukan serta merekomendasikan jalan keluarnya;

Menemukan kesenjangan sumberdaya tersedia disandingkan dengan kebutuhan penanganan darurat bencana menemukan serta merekomendasikan jalan keluarnya;

- a) Tujuan pokok penyusunan rencana kontinjensi.
- b) Target sasaran diseminasi yakni para pengambil kebijakan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta dunia usaha,
- c) Penentuan media melalui diskusi dalam forum pertemuan
- d) Paparan bagaimana memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan.
- e) Memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif dalam pelaksanaan diseminasi rencana kontinjensi.
- f) Perlunya evaluasi, sejauh mana audiens menjelaskan dengan baik tujuan penyusunan rencana kontinjensi.

e. Diskusi kelas

- a) Jelaskan tentang diseminasi rencana kontinjensi?
- b) Siapa saja target diseminasi rencana kontinjensi?
- c) Apa tujuan diseminasi rencana kontinjensi?

f. Jumlah JP

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit)
= 90 menit.

Prosedur Aktivasi Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta Menjelaskan SOP Penanganan Darurat bencana, prosedur aktivasi rencana kontinjensi, melakukan ekstraksi data dan informasi dari dokumen rencana kontinjensi untuk disandingkan dengan hasil kaji cepat, menggunakan data/informasi, tujuan, kebijakan dan strategy yang telah diseakati di dalam rencana kontinjensi sebagai bahan utama penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana melalui proses Planning dalam sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) serta penunjukan Komandan Penanganan Darurat

b. Hasil Belajar

Pada akhir materi, peserta mampu:

- 1) Menguraikan prosedur aktivasi draft rencana kontinjensi.
- 2) Menjelaskan rencana kontinjensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi.
- 3) Menjelaskan cara penyusunan SOP Penanganan Darurat Bencana
- 4) Menjelaskan proses pembentukan SKPDB Menjelaskan cara menyusun draft rencana operasi penanganan darurat sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010, berbasis rencana kontinjensi dan hasil kaji cepat.
- 5) Menjelaskan tata cara Rapat Koordinasi Darurat Forkopinda
- 6) Menjelaskan tata cara Raat Komando Informasi Bencana dalam rangkaian *Planning* untuk menyusun rencana operasi darurat bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu mensimulasikan Rapat Koordinasi Darurat Forkopinda dan proses aktivasi draft rencana kontinjensi sebagai dasar pembuatan rencana operasi darurat bencana melalui proses *P Planning* (Rapat Komando Informasi

Bencana) dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan menggunakan Perka BNPB No. 24/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana dan Perka BNPB No. 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

d. Materi

- e) Menjelaskan keterkaitan renkon dengan rencana operasi
 - (1) Renkon → sebagai dasar penyusunan renops, berisi kesepakatan bersama, tindakan teknis dan manajerial, sistem respons dan pengeralahan sumberdaya terhadap skenario dampak sebuah bencana.
 - (2) Renops → disusun sesaat terjadi bencana, berdasarkan renkon, memasukkan data kaji cepat. Berpedoman pada prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan, ketersediaan sumberdaya, yang informasinya sudah teridentifikasi dalam renkon, dengan tetap memperhatikan besarnya eskalasi dampak bencana yang terjadi di lapangan.
- f) Menjelaskan Prosedur Aktivasi
 - (1) Apabila terjadi bencana, maka rencana kontinjensi menjadi dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat, dengan memperhitungkan analisa hasil kajian cepat untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumber daya.
 - (2) Rencana operasi penanganan darurat, harus dijalankan oleh Struktur Komando Penanganan darurat. Rencana kontinjensi yang sudah dijadikan dasar rencana operasi penanganan darurat, tidak berlaku lagi.
 - (3) Hasil ekstraksi rencana kontinjensi tersebut kemudian disandingkan dengan hasil kaji ceat dan menjadi bahan dasar penyusunan rencana operasi.
- e) Menjelaskan Tata Cara Rapat Koordinasi Darurat

Menjelaskan Tata Cara melakukan RAPAT KOORDINASI DARURAT FORKOPINDA. Dilakukan paling lama 1x24 jam setelah kejadian bencana. Bertujuan untuk mengoordinasikan kekuatan yang tersedia untuk melakukan Penangan Darurat Bencana, mencari jalan keluar bagi kesenjangan sumberdaya, dan menentukan struktur organisasi PDB.
- f) **Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Operasi**

Proses penyusunan rencana operasi meliputi tahapan

 - 1) Tindakan awal (a.l. mengaktifkan dokumen rencana kontinjensi)
 - 2) Pada status siaga darurat menggunakan pengembangan skenario kejadian

bencana dari rencana kontinjensi

- 3) Penetapan tujuan dan sasaran (dari rencana kontinjensi tujuan, kebijakan, strategi penanganan darurat dan tujuan/sasaran bidang operasi)
- 4) Rapat rencana taktis
- 5) Persiapan rapat rencana operasi
- 6) Rapat rencana operasi
- 7) Penetapan rencana operasi
- 8) Rapat penjelasan rencana operasi
- 9) Pelaksanaan dan pengakhiran

6) Pengkajian Cepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)

Pengkajian cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi :

- a) cakupan lokasi bencana,
- b) jumlah korban,
- c) kerusakan prasarana sarana,
- d) gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumberdaya alam dan buatan
- e) saran tepat dalam rangka penanganan bencana,
- f) tugas tambahan membantu BPBD dalam mengkoordinasikan sektor2 terkait PB

7) Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

- a) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang di aktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Status keadaan darurat bencana dibedakan berdasarkan :
 - (1) status keadaan darurat bencana kabupaten/kota untuk kejadian bencana pada :
 - (a) satu kabupaten/kota terdampak
 - (b) beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi
 - (c) beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi
 - (2) status keadaan darurat bencana provinsi untuk kejadian bencana pada satu atau lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(3) Status keadaan darurat nasional.

e. Diskusi Kelas

- a) Jelaskan keterkaitan renkon dengan renops
- b) Jelaskan Prosedur Aktivasi
- c) Jelaskan Tata Cara Rapat Koordinasi Darurat
- d) Apa itu Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Operasi.
- e) Apa tugas pengkajian cepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)
- f) Jelaskan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

f. Jumlah JP

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit) = 90 menit.

Prosedur Kaji Ulang Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta menjelaskan urgensi dan kriteria kaji ulang rencana kontinjensi jika bencana tidak terjadi selama masa tertentu, yang bertujuan untuk memutakhirkan data dan informasi dinamika ancaman, perubahan kerentanan serta perubahan kemampuan/kapasitas sumberdaya.

b. Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu mensimulasikan kaji ulang draft rencana kontinjensi, bila tidak terjadi bencana selama waktu renkon yang telah ditetapkan, bila setelah kaji ulang beberapa kali, maka dilakukan pemutakhiran data, dinamika skala bencana, perubahan besaran kerentanan, dan kerubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu menjelaskan prosedur kaji ulang rencana kontinjensi.

d. Materi

- a) Paparan mengenai bila tidak terjadi bencana selama waktu renkon yang telah ditetapkan, maka rencana kontinjensi dapat diperpanjang untuk periode/kurun waktu tertentu berikutnya setelah dievaluasi.
- b) Apabila setelah kaji ulang beberapa kali atau ketika pakar menyatakan potensi

bencana tersebut sudah tidak ada, maka rencana kontinjensi dapat dinyatakan tidak berlaku. Jika suatu ketika potensi bencana timbul kembali, maka rencana kontinjensi tersebut dirujuk kembali.

c) **Permutakhiran data**

Permutakhiran data bertujuan untuk memverifikasi data sesuai dengan situasi terkini. Data-data yang dapat dimutakhirkan adalah:

- (1) Dinamika skala bencana
- (2) Perubahan besaran kerentanan
- (3) Perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya

Permutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain pertemuan berkala untuk kaji ulang, lokakarya, atau rapat konsultasi.

e. Diskusi kelas

Jelaskan apabila tidak terjadi bencana selama masa tertentu, bagaimana sebaiknya rencana kontinjensi ?

f. Jumlah JP

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit) = 90 menit.

Penyusunan Ringkasan Dokumen Rencana Kontinjensi

a. Deskripsi Singkat

Pada akhir penyelesaian draft dokumen rencana kontinjensi, disusun "Ringkasan Dokumen Rencana Kontinjensi" yang seluruh data diambil dari draft rencana kontinjensi yang sudah tersusun. Hal ini dimaksudkan ringkasan dokumen tersebut dapat menjadi **panduan/acuan yang cepat dalam pengambilan keputusan tindakan-tindakan awal pada saat terjadinya bencana.**

b. Hasil Belajar

- a) Peserta dapat menjelaskan tujuan penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi.
- b) Peserta dapat menyusun ringkasan dokumen rencana kontinjensi, yang merupakan ringkasan dari draft rencana kontinjensi yang telah selesai.

c. Indikator Hasil Belajar

- a) Menjelaskan tujuan penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi.
- b) Menyusun ringkasan dokumen rencana kontinjensi, merupakan ringkasan dari

draft rencana kontinjensi yang telah selesai.

d. Materi

a) Tujuan

Setelah penyelesaian draft rencana kontinjensi, disusun "Ringkasan Dokumen Rencana Kontinjensi" yang seluruh data diambil dari draft rencana kontinjensi yang sudah tersusun. Hal ini dimaksudkan bahwa ringkasan dokumen tersebut dapat menjadi panduan/acuan yang cepat dalam pengambilan keputusan tindakan-tindakan awal pada saat terjadinya bencana.

Ringkasan dokumen :

- (1) Uraian singkat gambaran umum wilayah provinsi/kabupaten/kota tempat kejadian bencana.
- (2) Uraian singkat ancaman bahaya yang terpilih yang dikembangkan rencana kontingensi nya, misalnya gunung api, sejarah meletusnya, potensi letusan saat ini, karakter letusan, luasan dampaknya dsb.
- (3) Narasi deskriptif mengenai skenario kejadian bencana berdasarkan kajian ilmiah dari ahli yang berkompeten dibidangnya, bahaya atau ancamannya, dan luasan dampak.
- (4) Uraian mengenai asumsi dampak terhadap aspek kehidupan dan penghidupan manusia, sarana prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, sosial ekonom, serta lingkungan. Penentuan desa/kelurahan yang terdampak beserta jumlah jiwa dan kepala keluarga, asumsi jumlah yang meninggal, luka berat, luka ringan, mengungsi, dan pindah.
- (5) Rencana jalur-jalur evakuasi ke tempat yang aman.
- (6) Rencana tempat-tempat pengungsian beserta kapasitasnya, yang aman dan terdekat dari desa/kelurahan terdampak. Menghitung Asumsi kebutuhan dasar shelter (Pos Komando Lapangan, Pos Kesehatan, beras, makanan, MCK, Dapur Umum, Gudang Simpan, Genset, Tenda) berdasarkan standar minimal.
- (7) Uraian mengenai tujuan atau kebijakan dan strategi Penanganan Darurat Bencana yang diterapkan oleh daerah setempat.
- (8) Perencanaan satuan tugas Penanganan Darurat Bencana atau kluster-kluster. Berisi uraian tentang kebutuhan, ketersediaan dan kesenjangan sumber daya manusia, peralatan, dan pendanaan sesuai asumsi dampak untuk merespon tanggap darurat. Antara lain kluster SAR dan

evakuasi, Kesehatan, Pengngsian dan Huntara (pendidikan dan relawan), Air bersih dan Sanitasi, Keamanan dan Ketertiban, klaster Khusus/Ternak. Diuraikan bagaimana untuk memenuhi kesenjangan tersebut.

(9) Manajemen dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, berisi tentang manajemen Pos Komando tanggap darurat dan organisasinya, penentuan letak Pos Komando Utama, Pos-Pos Lapangan, Jalur evakuasi, Pos Kesehatan, Dapur Umum, Gudang Logistik dll.

e. Diskusi kelas

- a) Apa tujuan penyusunan ringkasan dokumen rencana kontinjensi.
- b) Untuk menyusun ringkasan dokumen rencana kontinjensi, datanya dari mana
- c) Apa isi ringkasan dokumen rencana kontinjensi.

f. Jumlah JP

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit) = 90 menit.

Prosedur Formalisasi/Legalisasi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta menjelaskan prosedur formalisasi/legalisasi rencana kontinjensi. Proses formalisasi/legalisasi dokumen rencana kontinjensi merupakan suatu proses untuk membangun kesadaran para pihak tentang kesepakatan yang telah dibuat, serta untuk mensosialisasikan bahwa dokumen rencana kontinjensi yang telah disepakati ini merupakan pedoman para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat, serta untuk membangun komitmen bersama, sehingga diperlukan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum pelaksanaannya.

b. Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu:

- 1) Menjelaskan rencana kontinjensi merupakan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di daerah, serta untuk membangun komitmen bersama.
- 2) Menjelaskan BPBD pembentukan Tim Perumus untuk persiapan penerbitan Peraturan Kepala Daerah.

c. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir mata diklat, peserta mampu menjelaskan prosedur formalisasi/legalisasi rencana kontinjensi.

d. Materi

- a) Rencana kontinjensi merupakan bentuk kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, yang disusun dan disepakati bersama para pihak pelaku penanganan darurat. Merupakan dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana. Untuk memperoleh kesatuan persepsi dan pemahaman tentang arah operasi penanganan darurat bencana, diperlukan adanya produk hukum berupa Peraturan Kepala Daerah setempat, agar mempunyai kekuatan hukum bagi pelaksanaannya.
- b) Keterlibatan Tim Perumus Renkon
Dokumen rencana kontinjensi yang disusun melibatkan Tim Perumus yang terdiri atas unsur BPBD, TNI, Polri, Kesehatan, SAR, Sosial, PU, Perhubungan, Sekda (Bag. Hukum, Bag. Umum, Bag. Keuangan), dan unsur lain yang diperlukan. Keterlibatan unsur Sekda dalam Tim Perumus bertujuan mempercepat penerbitan Peraturan Kepala Daerah. Unsur unsur ini harus terlibat dalam proses formalisasi dokumen rencana kontinjensi.
- c) Uji publik rencana kontinjensi
Formalisasi Dokumen Rencana Kontinjensi dilakukan setelah selesai melakukan uji publik rencana kontinjensi di depan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, unsur masyarakat serta unsur dunia usaha.
- d) Pengesahan Peraturan Kepala Daerah
Setelah pelaksanaan uji publik dan penyempurnaan rencana kontinjensi, Kepala daerah memberikan pengesahan rencana kontinjensi tersebut, berupa peraturan kepala daerah atau kebijakan yang sesuai dengan aturan di daerah tersebut.
Proses pengesahan dapat dilakukan secara tertutup dan sederhana di ruangan kepala daerah dengan dihadiri para pejabat dari masing masing instansi perumus dan penyusun dokumen rencana kontinjensi. Dapat juga dibuat dalam suatu workshop sosialisasi setengah hari secara terbuka dengan mengundang lebih banyak instansi.

Hal terpenting dari proses pengesahan ini adalah setelah proses pengesahan dilakukan maka dokumen rencana kontinjensi harus diperbanyak dan diberikan kepada semua instansi dan organisasi terkait penanggulangan bencana di daerah tersebut.

e. **Diskusi Kelas**

Daftar Pertanyaan:

- 1) Mengapa perlu dilakukan formalisasi/legalisasi rencana kontinjensi?
- 2) Bagaimana rencana kontinjensi diformalisasi/dilegalisasi di daerah?
- 3) Apa saja tugas Tim perumus rencana kontinjensi?
- 4) Siapa saja yang terlibat dalam formalisasi/legalisasi rencana kontinjensi di daerah?

f. **Jumlah JP**

Simulasi Draft Rencana Kontinjensi, Rencana tindak lanjut, 2 JP (1 JP @ 45 menit) = 90 menit.

H. Keterampilan Memfasilitasi

Materi Pokok – Kemampuan Fasilitasi

21. Sub Materi Pokok – Fasilitasi Partisipatif

a. **Deskripsi Singkat**

Materi ini membekali peserta tentang prinsip metode fasilitasi partisipatif yakni menggunakan pendekatan partisipasi penuh seluruh peserta. Fasilitator berfungsi merumuskan pengetahuan dari peserta, dan bertugas untuk memancing peserta agar dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana, serta mendorong peserta yang pasif untuk lebih aktif.

b. **Hasil Belajar**

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mempraktekkan metode fasilitasi partisipatif, menggunakan pendekatan partisipasi penuh seluruh peserta, dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa dan dinamika kelompok, dimana fasilitator berfungsi merumuskan pengetahuan dari peserta, dan bertugas untuk memancing peserta agar dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya pendapat-pendapatnya serta mendorong peserta yang pasif untuk lebih aktif.

c. **Indikator Hasil Belajar**

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu mempraktekkan metode fasilitasi partisipasif dengan menggunakan pendekatan partisipasi penuh seluruh peserta, dimana fasilitator berfungsi merumuskan pengetahuan dari peserta dan bertugas untuk memancing peserta agar dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya pendapat-pendapatnya, serta mendorong peserta yang pasif untuk lebih aktif.

d. Materi

Prinsip menggunakan metode fasilitasi partisipasif yakni menggunakan pendekatan partisipasi penuh seluruh peserta. Fasilitator berfungsi merumuskan pengetahuan dari peserta, dan bertugas untuk memancing peserta agar dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana, serta mendorong peserta yang pasif untuk lebih aktif.

1) Pembelajaran Orang Dewasa

- Karakteristik belajar orang dewasa

Pembelajaran orang dewasa menstimulasi agar mampu melakukan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Belajar orang dewasa dilakukan secara berlanjut dari pengalaman kehidupan.

Karakteristik belajar orang dewasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri.
- 2) Mempunyai pengalaman yang banyak dan fungsi pengalaman bagi orang dewasa sebagai sumber belajar.
- 3) Mempelajari sesuatu yang ia perlukan dan pengalaman terbangun dari pemecahan masalah atau menyelesaikan tugas sehari-hari.
- 4) Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri, ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, orientasi belajar terpusat pada kegiatan

- Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa

- 1) Prinsip kemitraan, yakni peserta tidak diperlakukan sebagai siswa tetapi sebagai mitra belajar, sehingga hubungan yang dibangun bersifat membantu proses belajar peserta pelatihan.

- 2) Prinsip pengalaman nyata, yakni menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata/sebenarnya.
- 3) Prinsip partisipasi, yakni mendorong keterlibatan peserta secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, semua peserta wajib terlibat secara aktif dalam pembelajaran.
- 4) Prinsip kemandirian, yakni mendorong peserta untuk memiliki kebebasan dalam mencari tujuan pembelajaran.
- 5) Prinsip manfaat, yakni menjamin apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta.

2) Dinamika Kelompok

Suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu, memiliki hubungan psikologi antara satu dengan yang lain yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Dinamika kelompok dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah.

Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai
- Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain
- Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok
- Menimbulkan adanya i'tikad yang baik diantara sesama anggota kelompok.

Dinamika Kelompok mempunyai fungsi :

- Individu satu dengan yang lain akan terjadi kerjasama saling membutuhkan (individu tidak dapat hidup sendiri di dalam masyarakat)
- Dinamika kelompok memudahkan segala pekerjaan (dalam dinamika kelompok ada saling bantu antara anggota satu dengan anggota yang lain)
- Melalui dinamika kelompok segala pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi, mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diatur secara tepat,

efektif dan efisien (dalam dinamika kelompok pekerjaan besar akan dibagi-bagi sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing)

- Meningkatkan masyarakat yang demokratis, individu satu dengan yang lain dapat memberikan masukan atau berinteraksi dengan lainnya dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat.

e. Latihan

Diskusi kelas

Pertanyaan :

- a) Apa maksud dan tujuan materi teknik fasilitasi partisipatif
- b) Apa yang dimaksud pembelajaran orang dewasa.
- c) Jelaskan karakteristik dan prinsip pendidikan orang dewasa.
- d) Jelaskan apa itu dinamika kelompok.

f. Jumlah JP

2 JP (@ 45 menit) = 90 menit

22. Sub Materi Pokok – Teknik Fasilitasi

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta tentang teknik-teknik memfasilitasi dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, dalam penyusunan rencana kontinjensi yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mempraktekkan teknik-teknik memfasilitasi dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, dengan memahami perbedaan antara guru dan fasilitator, apa yang boleh dilakukan fasilitator, apa yang tidak boleh dilakukan fasilitator, dan persiapan sebelum fasilitasi, dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu mempraktekkan teknik-teknik memfasilitasi dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, dalam penyusunan rencana kontinjensi, yang inklusif dan mengacu pada tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sesuai Sistem Komando Penanganan darurat Bencana.

d. Materi

1. Perbedaan antara guru dan fasilitator

Perbedaan seorang guru dengan fasilitator adalah sebagai berikut :

Guru :

- (1) Pendekatan Pedagogi (Pendidikan konvensional)
- (2) Komunikasi satu arah
- (3) Menyampaikan informasi atau pengetahuan tdk perlu sintesa
- (4) Harus memiliki pengetahuan lebih

Fasilitator :

- (1) Pendekatan Andragogy (Pendidikan orang dewasa)
- (2) Komunikasi dua arah
- (3) Menggali informasi dan pengetahuan dari peserta dan membuat sintesa
- (4) Tidak harus lebih pandai dari peserta

2. Apa yang boleh dilakukan fasilitator

- (1) Menggunakan tata cara dan etika yang sesuai dalam memfasilitasi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (2) Memperlakukan peserta sebagai orang dewasa.
- (3) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta.
- (4) Mengatur lalulintas komunikasi diskusi.
- (5) Bertutur kata sopan dan jelas.
- (6) Membantu proses pembelajaran bersama.
- (7) Membantu peserta untuk menyimpulkan suatu diskusi.
- (8) Menulis dengan jelas dan besar.
- (9) Memberi perhatian yang merata kepada seluruh peserta.
- (10) Berikan tatapan mata secara adil dan periodic.

3. Apa yang tidak boleh dilakukan fasilitator

- (1) Menggunakan kosa kata, gesture, contoh, perumpamaan yang melecehkan salah satu jenis kelamin (perempuan) dan penyandang disabilitas
- (2) Merasa lebih pandai dari peserta.
- (3) Menggurui atau memerankan diri sebagai atasan.
- (4) Mendominasi pembicaraan kecuali pada saat menyampaikan hal-hal baru atau memberikan tugas.

- (5) Bersikap defensif atau mempertahankan argumen pribadi.
- (6) Memberi komentar yang membuat peserta merasa dikesalkan atau dilecehkan.
- (7) Mengejek atas kondisi fisik atau pembawaan seseorang.
- (8) Mencemooh atas jawaban atau presentasi yang dilakukan oleh peserta.

4. Persiapan sebelum fasilitasi

- (1) Mengerti tujuan lokakarya atau seminar atau pelatihan.
- (2) Membuat menguasai silabus agar bisa menguasai konteks materi.
- (3) Mengerti jumlah peserta, komposisi laki dan perempuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman dalam bidang yang menjadi topik, rata-rata umur dll.
- (4) Menyiapkan lembar kehadiran untuk memonitor tingkat kehadiran setiap peserta.
- (5) Pembagian sesi cukup berimbang antara teori dan praktik, antara ceramah dan diskusi atau curah pendapat.
- (6) Menyiapkan modul atau rencana fasilitasi.
- (7) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran.
- (8) Menyiapkan fisik dan mental sebelum memfasilitasi.
- (9) Membentuk tim fasilitator dan mendiskusikannya.
- (10) Mengecek tata ruang sebelum acara dimulai dan lakukan.

5) Latihan

Diskusi kelas

- a) Jelaskan perbedaan antara guru dan fasilitator
- b) Jelaskan apa yang boleh dilakukan fasilitator selama memfasilitasi
- c) Jelaskan apa yang tidak boleh dilakukan fasilitator selama memfasilitasi
- d) Apa saja persiapan sebelum fasilitasi.

Diskusi kelompok

- Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok.
- Seorang peserta dalam kelompok memilih satu materi pokok dan mempraktekkan fasilitasi partisipatif dan pembelajaran orang dewasa, dan peserta lainnya mengkritisi.
- Fasilitator memandu diskusi kelompok dan mengevaluasi.

6) Jumlah JP

3 JP (@ 45 menit) = 135 menit

Materi Pokok – *Micro-Teaching*

23. Sub Materi Pokok – Penyiapan Bahan Pembelajaran

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta untuk menyiapkan bahan pembelajaran meliputi Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang.

b. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta diharapkan mampu memahami tujuan *micro-teaching*, serta menyiapkan bahan pembelajaran meliputi Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu menyiapkan bahan pembelajaran meliputi Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang.

d. Materi

Sebelum melaksanakan pelatihan, fasilitator wajib menyiapkan bahan pembelajaran berupa Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang.

a) Tujuan *Micro-Teaching*

Pengajaran mikro (*micro-teaching*) merupakan *real teaching*, tetapi dalam skala mikro. Karakteristik yang khas dalam *micro-teaching* adalah komponen-komponen dalam pengajaran yang di-mikrokan atau di-sederhanakan. Dalam pengajaran sesungguhnya lingkup pembelajaran biasa tidak dibatasi, tetapi di *micro-teaching* terbatas pada satu kompetensi dasar atau satu hasil belajar atau satu materi pokok bahasan tertentu. Alokasi waktu terbatas antara 10-15 menit, jumlah siswa juga dikecilkan hingga berkisar 10-15 siswa, serta ketrampilan dasar yang dilatihkan juga terbatas.

Tujuan *micro-teaching* adalah :

- a) Meningkatkan kemampuan menilai diri sendiri dan menilai orang lain

- b) Meningkatkan rasa percaya diri
- c) Meningkatkan kemampuan pemilihan metode pengajaran
- d) Perbaikan terhadap keterampilan-keterampilan mengajar
- e) Menciptakan metode baru dalam mengajar
- f) Memiliki kesempatan belajar bersama

b) Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat

Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) berisi rincian nama diklat, mata diklat, materi pokok, alokasi waktu, deskripsi singkat mata diklat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, serta indikator keberhasilan.

c) Rencana Pembelajaran (RP)

Rencana Pembelajaran (RP) berisi rincian nama diklat, mata diklat, materi pokok dan sub materi pokok, alokasi waktu, deskripsi singkat mata diklat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, serta indikator keberhasilan. Rincian tahapan kegiatan fasilitator maupun peserta, metode pembelajaran, media/alat bantu.

d) Bahan Ajar

Bahan ajar setiap mata diklat berisi deskripsi secara rinci latar belakang, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, durasi waktu, alat bantu, serta rincian detail materi pokok dan sub materi pokok.

e) Bahan Tayang

Bahan tayang adalah seluruh materi pokok dan sub materi pokok yang dituangkan dalam bentuk tayangan atau *power-point*, untuk ditayangkan pada saat proses pembelajaran/pelatihan.

e. Diskusi Kelompok

- a) Setiap peserta memilih **satu materi pokok**, untuk dikembangkan dalam praktek *micro-teaching*.
- b) Fasilitator memandu peserta dalam penyusunan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD).
- c) Fasilitator memandu peserta dalam penyusunan Rencana Pembelajaran (RP),
- d) Fasilitator memandu peserta dalam penyusunan Bahan Ajar, dan
- e) Fasilitator memandu peserta dalam penyusunan Bahan Tayang.

f. Jumlah JP

10 JP (@ 45 menit) = 450 menit

24. Sub Materi Pokok – Praktek *Micro-Teaching*

a. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali peserta untuk mempraktekkan bahan pembelajaran yang sudah disiapkan pada sesi sebelumnya berupa Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang, kepada sekelompok peserta lainnya.

b. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta diharapkan mampu melaksanakan proses pembagian kelompok serta mempraktekkan bahan pembelajaran yang sudah disiapkan pada sesi sebelumnya berupa Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang, kepada sekelompok peserta lainnya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran materi ini peserta mampu mempraktekkan bahan pembelajaran yang sudah disiapkan pada sesi sebelumnya berupa Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang, kepada sekelompok peserta lainnya.

d. Materi

1) Pembagian kelompok

Sebagaimana pengertian *micro-teaching* merupakan pengajaran sebenarnya namun bukan di kelas yang sebenarnya, atau merupakan Belajar untuk Mengajar dengan asumsi melalui penyederhanaan beberapa unsur diatas, untuk lebih memudahkan melatih keterampilan tertentu sebagai persiapan untuk menghadapi pengajaran kelas sebenarnya.

Peserta yang telah memilih satu materi yang telah dikembangkan dalam Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPM), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang, selanjutnya seluruh peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan bimbingan beberapa fasilitator.

Maksud pembagian kelompok ini untuk memperkecil jumlah peserta dalam *micro-teaching*, sesuai dengan konsep tersebut diatas.

2) Praktek *micro-teaching*

- a) Setiap peserta telah memilih **satu materi pokok**.
- b) Seluruh peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok diskusi.

- c) Setiap kelompok diskusi dipandu fasilitator melaksanakan proses mikro teaching.
- d) Dalam setiap kelompok, setiap peserta mempraktekkan cara fasilitasi dengan mempraktekkan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang, yang telah disiapkan sebelumnya.
- e) Dilakukan diskusi dan tanya jawab setiap peserta.
- f) Fasilitator menilai proses setiap peserta :
 - Bagaimana materi yang sudah disiapkan berupa Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMMD), Rencana Pembelajaran (RP), Bahan Ajar, dan Bahan Tayang.
 - Bagaimana penampilan dan cara posisi didepan kelas.
 - Bagaimana membuka sesi.
 - Bagaimana proses presentasi.
 - Bagaimana penggunaan alat-alat bantu presentasi.
 - Bagaimana penggunaan bahasa.
 - Bagaimana cara menjawab pertanyaan.
 - Bagaimana mengatur diskusi.
 - Bagaimana menutup sesi.

e. Diskusi Kelompok

Melaksanakan diskusi kelompok seperti dalam materi tersebut diatas, yakni peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap peserta mempraktekkan **satu materi** untuk dilakukan proses fasilitasi didepan kelompoknya, dan melaksanakan diskusi, setiap kelompok diskusi dipandu fasilitator melaksanakan proses *mikro teaching*. Fasilitator menilai proses setiap peserta.

f. Jumlah JP

5 JP (@ 45 menit) = 225 menit

I. EVALUASI

Evaluasi pelatihan merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta pelatihan dengan melakukan test pra pelatihan (Pre-test) dan test pasca pelatihan (Post-test). Tujuannya untuk menyandingkan penilaian awal dan penilaian akhir peserta didik. Dilakukan juga observasi evaluasi penyelenggaraan

pelatihan dari berbagai aspek, yakni: Materi Pelatihan, Proses dan Metode Pelatihan, Fasilitator, Narasumber, Peserta, Panitia dan Logistik. Hasil evaluasi penilaian sebagai masukan/umpan balik penyelenggaraan pelatihan berikutnya. Berbagai aspek positif akan tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, sementara aspek negatif atau kekurangan akan dicoba diperbaiki dan dibenahi kembali.

Prinsip-prinsip evaluasi

1. **Objektif**, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
2. **Adil**, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
3. **Terpadu**, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
4. **Terbuka**, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
5. **Menyeluruh dan berkesinambungan**, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
6. **Sistematis**, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
7. **Akuntabel**, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Beberapa Tipe Evaluasi

1. Evaluasi belajar, mengukur perubahan pengetahuan, sikap dan praktik peserta. Hasil test pra pelatihan (pre-test) dibandingkan dengan hasil tes pasca pelatihan (post-test).
2. Evaluasi reaksi, untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan atau salah satu komponennya.
3. Evaluasi performa, mengukur sejauh mana performa peserta berubah sebelum pelatihan dibandingkan dengan setelah pelatihan.
4. Evaluasi dampak, mengukur efektivitas pelatihan dengan menilai tipe dan tingkatan perubahan yang telah ditimbulkan peserta pada organisasi/ kelompok sasaran yang bekerja sama dengan mereka.

BAB III

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kurikulum yang telah tersusun, akan dilanjutkan dengan penyusunan **Pedoman Fasilitator** dan **Modul Peserta** serta **pembuatan bahan tayang presentasi** (*power-point*) untuk pelaksanaan diklat penyusunan rencana kontinjensi.

A. Sasaran

Sasaran pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana kontinjensi adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

B. Karakteristik Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Karakteristik calon peserta pendidikan dan pelatihan

1. Pernah mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikat dasar manajemen bencana.
2. Pernah mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikat penyusunan rencana kontinjensi.
3. Pernah mengikuti penyusunan rencana kontinjensi.
4. Minimal eselon IV bagi lembaga Pemerintah atau manajer tingkat menengah bagi lembaga Non-Pemerintah.
5. Diusulkan oleh Instansi/Kementerian/Lembaga calon peserta
6. Lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana.

C. Karakteristik Tenaga Pengajar

Tenaga Pendidik penyusunan rencana kontinjensi dapat berasal dari tenaga pendidik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik dari unsur pemerintah maupun unsur non-pemerintah. Tugas dan fungsi memfasilitasi proses pembelajaran (memotivasi, menyampaikan materi/topik, mengarahkan diskusi dan tanya jawab, memberikan tugas kelompok). Secara ideal, kriteria fasilitator antara lain sebagai berikut:

1. Pengalaman:
 - a. Memfasilitasi pelatihan bidang penanggulangan bencana minimal 3 (tiga) tahun.
 - b. Pernah terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
 - c. Diutamakan mereka yang pernah mengikuti penyusunan rencana kontinjensi.

2. Pengetahuan:
 - a. Diutamakan yang sudah mendapatkan *Training of Trainer* (TOT) penyusunan rencana kontinjensi
 - b. Memiliki pemahaman tentang sistem penanggulangan bencana di Indonesia
 - c. Pernah mendapatkan pelatihan bidang penanggulangan bencana
 - d. Mampu Menjelaskan tentang standar pelayanan minimal sesuai bidangnya masing masing
3. Keterampilan
 - a. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi
 - b. Memiliki kemampuan fasilitasi peserta yang berasal dari berbagai lembaga/organisasi dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang bervariasi tentang rencana kontinjensi.

D. Karakteristik Penyelenggara

Penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi penanggulangan bencana berasal dari pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, yakni BNPB dan BPBD. Untuk penyusunan rencana kontinjensi yang bersifat sektoral, dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait tingkat nasional maupun lokal (daerah) melalui koordinasi BNPB/BPBD. Selanjutnya, pihak penyelenggara memberikan laporan dan salinan dokumen rencana kontinjensi yang sudah dibuat kepada BPBD/BNPB untuk diarsipkan dan dapat digunakan sewaktu waktu jika diperlukan.

E. Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan

Ruangan lokakarya, meja, kursi, data, peta, komputer/Laptop, LCD proyektor, kertas flipchart, kertas plano, ATK, kertas metaplano, peralatan *sound-system*.

F. Metodologi Pendekatan Konsep Pelatihan Partisipatif

Pelatihan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas peserta dan berbagi pengalaman dan pembelajaran. Fasilitator mendorong dan mengondisikan peserta untuk saling belajar sesama peserta, bukan hanya dari narasumber atau fasilitator, melalui pelatihan partisipatif.

Karakteristik belajar orang dewasa:

1. Sudah berpengalaman sehingga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama peserta.
2. Belajar bukan untuk belajar saja, melainkan untuk diterapkan.
3. Tidak suka digurui, namun juga membutuhkan informasi baru bermanfaat.

4. Sudah memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Misal: sudah menggunakan kacamata baca, kapasitas waktu belajar efektif menurun.
5. Mengembangkan proses pembelajaran dari pengalaman dan menghubungkan teori dengan kehidupan nyata.
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan peserta.
7. Mempertimbangkan keterbatasan fisik dan psikis peserta orang dewasa.

Proses yang paling penting adalah mengolah pengalaman menjadi pembelajaran bersama. Agar pengalaman dapat menghasilkan pengetahuan, pelatih-fasilitator secara taat azas harus memproses pelajaran mengikuti daur belajar yang terdiri dari empat tahap aktivitas yakni:

1. melakukan kegiatan
2. mengumpulkan informasi didasarkan pada pemahaman peserta atas kegiatan tersebut
3. melakukan analisis data tersebut
4. menyimpulkan

Tim pelatih-fasilitator bekerja sama mengelola sebuah pelatihan secara penuh waktu (full time) mengingat dengan konsep POD, setiap topik belajar merupakan kesinambungan dari topik belajar sebelum dan sesudahnya. Pembelajaran merupakan proses akumulasi yang dijalankan oleh narasumber per sesi seperti seminar.

G. Pengelolaan Pelatihan

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan hasil penyusunan standar baku kompetensi, namun pendekatan pelatihan partisipatif tetap diterapkan dengan melakukan kajian kebutuhan peserta setiap penyelenggaraan pelatihan. Kurikulum dan Materi dalam Buku Materi Pelatihan digunakan oleh tim pelatih-fasilitator sebagai dasar untuk memodifikasi sesuai hasil peninjauan kebutuhan belajar para peserta. Langkah-langkah kerja yang dilakukan tim pelatih-fasilitator adalah:

1. **Penjajakan Kebutuhan Pelatihan** Yaitu kajian kebutuhan belajar calon peserta pelatihan yang menghasilkan daftar pengetahuan (P), sikap (S), dan keterampilan (K) yang menjadi kesenjangan kompetensi peserta. Caranya dengan membandingkan antara PSK yang dibutuhkan sebagai standar kompetensi dibandingkan dengan PSK yang dimiliki. Untuk melakukan penjajakan kebutuhan secara cepat, dapat dipilih sampel calon peserta untuk mengetahui ruang lingkup kebutuhan belajar pada topik pelatihan dalam buku Materi ini yang dibutuhkan peserta.
2. **Penyusunan Rencana Pelatihan**

Tim fasilitator menyusun rencana pelatihan dengan merumuskan tujuan dan keluaran disesuaikan dengan hasil peninjauan kebutuhan belajar. Rencana pelatihan biasanya berupa Kerangka Acuan Kegiatan (ToR) Pelatihan (Term of Reference). Strategi pelatihan dikembangkan untuk mencapai tujuan, berat tidaknya bobot dan jumlah materi pelatihan sangat bergantung pada kondisi calon peserta pelatihan di daerah. Terutama bila pelatihan ini dilakukan oleh BPBD Propinsi untuk BPBD Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, keberagaman ini akan mempengaruhi.

3. **Modifikasi Kurikulum dan Materi Pelatihan**

Sesuai dengan penyusunan rencana pelatihan, disusun kurikulum pelatihan dan bahan pelatihan. Kurikulum dan jadwal pelatihan yang terdapat dalam buku ini dapat dijadikan rujukan, setiap daerah dapat memodifikasi dan menyesuaikannya.

4. **Pengorganisasian Pelatihan**

Pengelolaan tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh panitia maupun tim pelatih-fasilitator. Pada tahap persiapan, selain penyebaran undangan kepada peserta, juga dilakukan rapat-rapat persiapan tim fasilitator, penyiapan alat dan bahan pelatihan, serta penyiapan tempat pelatihan sesuai kebutuhan. Sehari menjelang pelaksanaan, dilakukan pengaturan (tata letak) ruangan agar sesuai dengan proses belajar partisipatif. Pada saat pelatihan, pengelolaan kegiatan belajar diserahkan pada tim fasilitator sedangkan pejabat dari BNPB/BPBD hanya membuka dan menutup pelatihan. Sebagai support bertindak menjadi panitia dibentuk oleh lembaga penyelenggara (BNPB/BPBD). Pasca pelatihan, dibuat laporan kegiatan dan dilakukan pendampingan terhadap rencana tindak lanjut pelatihan di daerah.

H. Metode dan Media Pembelajaran yang Digunakan

1. **Pemaparan**

Metode ini digunakan di setiap Materi tetapi tidak memiliki bobot yang besar, melainkan bagian dari sebuah proses diskusi. Pemaparan kebanyakan dilakukan oleh fasilitator untuk mengantar diskusi dan memberikan masukan bila perlu, ditambah oleh beberapa narasumber khusus apabila diperlukan.

2. **Diskusi**

Metode ini digunakan di setiap Materi dan merupakan metode yang paling dominan. Analisis dan gagasan yang dikembangkan peserta mengenai suatu topik lebih banyak diproses melalui diskusi ketimbang tugas individu.

3. **Curah pendapat (*Brain Storming*)**

Metode ini digunakan hampir di setiap Materi untuk mendorong partisipasi peserta dan tukar pengalaman.

4. **Praktik**

Metode ini digunakan hampir di setiap Materi dan lebih banyak dipergunakan untuk kerja kelompok.

5. **Studi kasus**

Metode ini digunakan hampir di setiap materi untuk mendorong peserta menggali informasi dari daerah masing-masing sebagai suatu pembelajaran riil di daerahnya. Untuk pelatihan menyusun rencana kontinjensi, di pakai studi kasus dari salah satu kabupaten atau kota atau provinsi di daerahnya, dengan menggunakan data-data dalam angka dan data lainnya di daerah tersebut.

6. **Permainan**

Permainan digunakan untuk mengembangkan dinamika kelompok. Selain itu, permainan juga digunakan sebagai ice breaking di awal sesi pelatihan, atau sebagai energizing di tengah sesi saat peserta mengalami kejenuhan.

I. Sumber Belajar

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang pendanaan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB),
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2014 tentang Peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan pengurangan bencana,
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender,
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 Tahun 2014 tentang

Penanganan perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 6a Tahun 2011 Tentang Dana Siap Pakai.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Operasi Penanganan darurat.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan rencana operasi darurat bencana,
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistic dan Peralatan PB.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pedoman Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
15. Kurikulum dan Modul Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, Pusdiklat PB BNPB, 2012.
16. Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, BNPB, Edisi Ketiga 2013.
17. Draft Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, BNPB, Edisi Keempat 2017.
18. Hasil workshop Review Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi di berbagai daerah sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2017.
19. Hasil workshop review proses perencanaan kontinjensi tanggal 30 - 31 juli 2012
20. Hasil Workshop penyusunan kurikulum tanggal 31 Juli - 1 Agustus 2012
21. Hasil Workshop pembelajaran perencanaan kontinjensi khususnya ancaman tsunami tanggal 3 – 4 Oktober 2012
22. Hasil beberapa workshop review kurikulum dan modul penyusunan rencana kontinjensi Tahun 2016 – 2017 – Pusdiklat PB BNPB.
23. Rangkaian hasil pertemuan-pertemuan membahas kurikulum dan modul penyusunan rencana kontinjensi tahun 2017
24. Learning Materie Contingency Planning, UNHCR, 2011
25. Contingency Planning For Emergency, a manual for local government unit second edition May, UNHCR, NDCC, 2003
26. Handbook for Emergencies, UNHCR Geneva, ca. 2002

BAB IV

PENUTUP

Kurikulum pelatihan fasilitator penyusunan rencana kontinjensi ini akan dilanjutkan dengan Modul Peserta dan Pedoman Fasilitator pelatihan penyusunan rencana kontinjensi dan diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan bagi pemangku kepentingan terkait kedaruratan bencana, baik unsur pemerintah, unsur pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun organisasi kemasyarakatan (LSM) nasional dan internasional, serta lembaga usaha.

LAMPIRAN

Lembar Profil Lembaga

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA LEMBAGA/INSTANSI | |
| 2. ALAMAT NO. TELP / FAX E-MAIL | |
| 3. CONTACT PERSON | |
| 4. JABATAN NO. TELP / HP | |
| 5. TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI | |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINGENSI | |
| 7. CAKUPAN / WILAYAH KERJA | |
| 8. KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | (1) Personil :orang (2) Prasarana : a. b. c. dst. (3) Sarana : a. b. c. dst |
| 9. KEMAMPUAN LAINNYA | |

Disetujui oleh,

Kepala SKPD

.....,

I. DAFTAR KONTAK DAN INSTANSI

| No | Nama Institusi | Alamat | No. Telpon dan Fax | Alamat E-mail | Nama kontak yang mudah dihubungi |
|-----------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontingensi menghadapi ancaman bahaya di Kabupaten/Kota Provinsi, tanggal sampai dengan bulan tahun

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta |
| Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan |
| Instansi | Instansi | Instansi | Instansi | Instansi |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta |
| Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan | Jabatan |
| Instansi | Instansi | Instansi | Instansi | Instansi |

LAMPIRAN

Rencana Tindak Lanjut

| No. | Jenis Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Instansi Penanggung jawab | Waktu pelaksanaan | Tempat pelaksanaan |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Penyusunan dan Pengembangan Prosedur Operasi Penanganan Darurat | a. b. ... c. ... | | | |
| 2 | Latihan Kesiapsiagaan | | | | |
| 3 | Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan | | | | |
| 4 | Proses Legalisasi | | | | |
| 5 | Operasionalisasi atau Kaji Ulang Rencana Kontingensi | | | | |

LAMPIRAN

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Judul Pelatihan : _____ Lokasi : _____
Tanggal : _____ Evaluator : _____

**Kami selalu ingin memperbaiki kualitas pelatihan yang kami selenggarakan.
Umpan balik Anda sangat penting untuk perbaikan tersebut. Silahkan lingkari**

| | Sangat tidak setuju | Tidak setuju | Netral | Setuju | Sangat setuju |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |
| Tujuan Pembelajaran | | | | | |
| Tujuan pembelajaran dijelaskan pada saya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Isi pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Semua tujuan pembelajaran tercapai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

angka yang sesuai dengan penilaian Anda.

| Materi/pembelajaran | | | | | |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Metode pembelajaran | | | | | |
| Metode pembelajaran mendorong peserta berperan aktif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Metode pembelajaran cocok untuk materi yang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| disajikan | | | | | | |
| Fasilitator/Trainer | | | | | | |
| Fasilitator/trainer mampu memotivasi peserta dalam mengikuti pelatihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fasilitator/trainer menyampaikan materi secara terorganisasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fasilitator mampu membantu peserta dalam menguasai materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Handout dan alat bantu | | | | | | |
| Tampilan handout menarik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Isi handout mencakup materi yang disampaikan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Alat bantu visual membantu Menjelaskan materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Alat peraga efektif membantu pembelajaran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|----|---|---|--------------------|
| | | Sangat buruk | | | | Sangat baik |
| | | ☹ | ☹☹ | ☺ | ☺ | ☺☺ |
| Fasilitas | | | | | | |
| Ruang pembelajaran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Peralatan audio visual di kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ruang/kamar tidur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Konsumsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pelayanan panitia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menulis pada bagian kosong.

Apa yang paling Anda sukai dari pelatihan ini? (Jika ada)

Apa yang harus diperbaiki dari pelatihan ini? (Jika ada)

**JADWAL TRAINING OF FACILITATOR (ToF)
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI**

| No | Waktu | Materi | Durasi | Ket |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Hari Pertama | | | | |
| 1. | 08.00 – 09.00 | PEMBUKAAN | 45 menit | 1 JP |
| 2. | 09.00 – 09.45 | PRE-TEST, Pengantar dan Kontrak Belajar | 45 menit | 1 JP |
| 3. | <i>09.45 – 10.00</i> | <i>Rehat</i> | <i>15 menit</i> | |
| 4. | 10.00 – 10.45 | Pengarahan Program Diklat | 45 menit | 1 JP |
| 5. | 10.45 – 11.30 | Dinamika kelompok | 45 menit | 1 JP |
| 6. | 11.30 – 12.15 | Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi | 45 menit | 1 JP |
| 7. | <i>12.15 – 13.15</i> | <i>ISHOMA</i> | <i>60 menit</i> | |
| 8. | 13.15 – 14.00 | Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi | 45 menit | 1 JP |
| 9. | 14.00 – 14.45 | Prinsip dan Proses serta Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi (Prinsip) | 45 menit | 1 JP |
| 10. | 14.45 – 15.30 | Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Proses) | 45 menit | 1 JP |
| 11. | 15.30 – 16.00 | <i>Rehat</i> | <i>30 menit</i> | |
| 12. | 16.00 – 16.45 | Pengelolaan serta Pengorganisasian Data dan Informasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Penyelenggaraan) | 45 menit | 1 JP |
| 13. | 16.45 – 17.30 | Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi | 45 menit | 1 JP |
| Hari Kedua | | | | |
| 14. | 08.00 – 08.15 | Review Harian | 15 menit | |
| 15. | 08.15 – 09.00 | Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi (Pengarusutamaan gender dalam PB) | 45 menit | 1 JP |
| 16. | 09.00 – 09.45 | Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi (Penyandang disabilitas dalam PB) | 45 menit | 1 JP |
| 17. | <i>09.45 – 10.00</i> | <i>Rehat</i> | <i>15 menit</i> | |
| 18. | 10.00 – 10.45 | Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontinjensi (Pelibatan lembaga usaha dalam PB) | 45 menit | 1 JP |
| 19. | 10.45 – 11.30 | Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi (Identifikasi ancaman) | 45 menit | 1 JP |
| 20. | 11.30 – 12.15 | Prioritas Ancaman dalam Menyusun Rencana Kontinjensi (Prioritas ancaman) | 45 menit | 1 JP |

| No | Waktu | Materi | Durasi | Ket |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 21. | 12.15 – 13.15 | ISHOMA | 60 menit | |
| 22. | 13.15 –14.00 | Pengantar Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Konsep) | 45 menit | 1 JP |
| 23. | 14.00 – 14.45 | Pengantar Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Format) | 45 menit | 1 JP |
| 24. | 14.45 – 15.30 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Skenario kejadian bencana) | 45 menit | 1 JP |
| 25. | 15.30 – 16.00 | Rehat | 30 menit | |
| 26. | 16.00 – 16.45 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Asumsi dampak bencana) | 45 menit | 1 JP |
| 27. | 16.45 – 17.30 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Aturan kerangka kerja penanganan darurat) | 45 menit | 1 JP |
| Hari Ketiga | | | | |
| 28. | 08.00 – 08.15 | Review Harian | 15 menit | |
| 29. | 08.15 – 09.00 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Teknik Penyusunan kebijakan dan strategi) | 45 menit | 1 JP |
| 30. | 09.00 – 09.45 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Perencanaan Bidang Operasi, situasi, sasaran, kegiatan, Proyeksi kebutuhan sumberdaya) | 45 menit | 1 JP |
| 31. | 09.45 – 10.00 | Rehat | 15 menit | |
| 32. | 10.00 – 10.45 | Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Ketersediaan dan Kesenjangan sumberdaya) | 45 menit | 1 JP |
| 33. | 10.45 – 11.30 | Uji draft rencana kontinjensi | 45 menit | 1 JP |
| 34. | 11.30 – 12.15 | Rencana tindak lanjut, Diseminasi, Aktivasi, Kaji ulang, Ringkasan, Legalisasi | 45 menit | 1 JP |
| 35. | 12.15 – 13.15 | ISHOMA | 60 menit | |
| 36. | 13.15 –14.00 | Kemampuan Fasilitasi (Fasilitasi Partisipatif) | 45 menit | 1 JP |
| 37. | 14.00 – 14.45 | Kemampuan Fasilitasi (Teknik Fasilitasi) | 45 menit | 1 JP |
| 38. | 14.45 – 15.30 | Kemampuan Fasilitasi (Diskusi Kelompok) | 45 menit | 1 JP |
| 39. | 15.30 – 16.00 | Rehat | 30 menit | |
| 40. | 16.00 – 16.45 | Kemampuan Fasilitasi (Diskusi Kelompok) | 45 menit | 1 JP |
| 41. | 16.45 – 17.30 | Kemampuan Fasilitasi (Diskusi Kelompok) | 45 menit | 1 JP |
| Hari Keempat | | | | |
| 42. | 08.00 – 08.15 | Review Harian | 15 menit | |
| 43. | 08.15 – 09.00 | Mikro teaching - presentasi | 45 menit | 1 JP |
| 44. | 09.00 – 09.45 | Mikro teaching - presentasi | 45 menit | 1 JP |

| No | Waktu | Materi | Durasi | Ket |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 45. | <i>09.45 – 10.00</i> | <i>Rehat</i> | <i>15 menit</i> | |
| 46. | 10.00 – 10.45 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan RPBMD | 45 menit | 1 JP |
| 47. | 10.45 – 11.30 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan RPBMD | 45 menit | 1 JP |
| 48. | 11.30 – 12.15 | <i>Mikro teaching</i> - Penyiapan RP | 45 menit | 1 JP |
| 49. | <i>12.15 – 13.15</i> | <i>ISHOMA</i> | <i>60 menit</i> | |
| 50. | 13.15 –14.00 | <i>Mikro teaching</i> - Penyiapan RP | 45 menit | 1 JP |
| 51. | 14.00 – 14.45 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan Bahan Ajar | 45 menit | 1 JP |
| 52. | 14.45 – 15.30 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan Bahan Ajar | 45 menit | 1 JP |
| 53. | <i>15.30 – 16.00</i> | <i>Rehat</i> | <i>30 menit</i> | |
| 54. | 16.00 – 16.45 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan Bahan tayang | 45 menit | 1 JP |
| 55. | 16.45 – 17.30 | <i>Mikro teaching</i> – Penyiapan Bahan tayang | 45 menit | 1 JP |
| Hari Kelima | | | | |
| 56. | 08.00 – 08.15 | Review Harian | 15 menit | |
| 57. | 08.15 – 09.00 | <i>Mikro teaching</i> – Presentasi peserta | 45 menit | 1 JP |
| 58. | 09.00 – 09.45 | <i>Mikro teaching</i> – Presentasi peserta | 45 menit | 1 JP |
| 59. | <i>09.45 – 10.00</i> | <i>Rehat</i> | <i>15 menit</i> | |
| 60. | 10.00 – 10.45 | <i>Mikro teaching</i> – Presentasi peserta | 45 menit | 1 JP |
| 61. | 10.45 – 13.30 | <i>ISHOMA</i> | | |
| 62. | 13.30 – 14.15 | <i>Mikro teaching</i> – Presentasi peserta | 45 menit | 1 JP |
| 63. | 14.15 – 15.30 | <i>Mikro teaching</i> – Presentasi peserta | 45 menit | 1 JP |
| 64. | 15.30 – 16.00 | <i>Rehat</i> | <i>30 menit</i> | |
| 65. | 16.00 – 16.45 | POST-TEST | 45 menit | 1 JP |
| 66. | 16.45 – 17.30 | PENUTUPAN | 45 menit | 1 JP |
| | | | | |



MATERI



**Pelatihan Fasilitator
Penyusunan Rencana Kontinjensi
Dengan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas,
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB),
dan Pelibatan Lembaga Usaha**

BAHAN PEMBELAJARAN

1. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat
2. Rencana Pembelajaran
3. Bahan Ajar
4. Bahan Tayang

Nama

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN 2018



**RANCANG BANGUN
PEMBELAJARAN MATA DIKLAT
(RBPMD)**

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

1. Nama Diklat : Diklat
2. Mata Diklat :
3. Materi Pokok :
 1.
 2.
 3.
4. Alokasi Waktu : .. *Jam Pelajaran @ 45 menit = ... menit*
5. Deskripsi Singkat : Mata Diklat ini membahas :
 1.

 2.

 3.

5. Tujuan Pembelajaran
- a. Kompetensi Dasar : Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu

b. Indikator Keberhasilan :

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATERI POKOK | SUB MATERI POKOK | METODE | ALAT BANTU/MEDIA | ESTIMASI WAKTU | REFERENSI |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: | | | | Laptop | .. JP = .. menit | 1..... 2..... 3..... 4..... |
| 2 | Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: | | | | Laptop | | |
| 3 | Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: | | | | Laptop | .. JP = .. menit | |

Keterangan:

LCD = *Liquid Crystal Display*

Bogor, 2018

Nama



RENCANA PEMBELAJARAN (RP)

RENCANA PEMBELAJARAN

1. Nama Diklat : Diklat
2. Alokasi Waktu : .. *Jam Pelajaran @ 45 menit = ... menit*
3. Deskripsi Singkat : Mata Diklat ini membahas :
 1. Materi ini membekali peserta tentang
.....
.....
 2. Materi ini membekali peserta tentang
.....
.....
 3. Materi ini membekali peserta tentang
.....
.....
4. Tujuan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu.....
.....
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:
 1. Menjelaskan
 2. Menguraikan
 3. Memahami
 4. Menjelaskan

b. Indikator Keberhasilan

5. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

a. Materi Pokok

- 1)
- 2)
- 3)

b. Sub Materi Pokok

- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 2.1.....

- 2.2.
- 2.3.
- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.

b. Indikator Keberhasilan :

| NO. | TAHAPAN | KEGIATAN | | Metode | Media/Alat Bantu | Alokasi Waktu |
|-----|----------|-------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | KEGIATAN | FASILITATOR | PESERTA | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Pendahuluan | 1.1 1.2 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperhatikan, bertanya, menjawab, mencatat. ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Diskusi, ▪ <i>Brainstorming</i> kelas | Laptop/LCD Projector Whiteboard Modul Flipchart | 30 menit |
| 2. | Penyajian 1) | Fasilitator memulai sesi dengan memberikan penjelasan : 1. 2. Menggali kreatifitas dan menggugah peserta 1. 2. 1. 2. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperhatikan, bertanya, menjawab, mencatat. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Diskusi, ▪ <i>Brainstorming</i> kelas | Laptop/LCD Projector Whiteboard Modul Flipchart | 165 menit |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>1.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | |
| | <p>3)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | <p>▪ Memperhatikan, bertanya, menjawab, mencatat.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| 3. | Penutup | <p>Fasilitator memulai sesi dengan memberikan penjelasan :</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>▪ Memperhatikan, bertanya, menjawab, mencatat.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>1. Ceramah</p> <p>2. Tanya Jawab</p> | <p>Laptop/LCD Projector Whiteboard Modul Flipchart</p> | 30 menit |

8. REFERENSI :
1.
2.
3.

9. EVALUASI :



BAHAN AJAR

.....

.....

.....

Nama

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2018

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|--|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| | | PENDAHULUAN | |
| | | LATAR BELAKANG | |
| | | TUJUAN PEMBELAJARAN | |
| | | INDIKATOR KEBERHASILAN | |
| | | DURASI WAKTU | |
| | | ALAT DAN BAHAN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | PENUTUP | |
| | | KESIMPULAN | |
| | | SARAN | |
| | | DAFTAR PUSTAKA | |
| | | BIODATA PENULIS | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Tujuan Pembelajaran

a. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu.....

.....
.....
.....

3. Indikator Keberhasilan :

Pada akhir mata diklat, peserta mampu :

- a.
- b.
- c.

4. Durasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam penyampaian modul ini adalahdengan metode penyampaian sebagai berikut :

- a.menit
- b.menit
- c.menit

5. Alat dan Bahan

.....
.....
.....

BAB II



Indikator Keberhasilan :

Pada akhir mata diklat, peserta mampu



Bahan Bacaan Mata Diklat

Kata Kunci:

-
-
-

Daftar Pertanyaan

-
-
-

1.

- a.
- b.
- c.

2.

- a.
- b.
- c.

Latihan

Diskusi kelas

- a.
- b.
- c.

Rangkuman

- a.
- b.
- c.

Evaluasi

- a.
- b.
- c.

BAB III



Indikator Keberhasilan :

Pada akhir mata diklat, peserta mampu



Bahan Bacaan Mata Diklat

Bahan Bacaan Mata Diklat

Kata Kunci:

-
-
-

Daftar Pertanyaan

-
-
-

- 3.**
- a.
 - b.
 - c.

- 4.**
- a.
 - b.
 - c.

**Latihan
Diskusi kelas**

- a.
- b.
- c.

Rangkuman

- a.
- b.
- c.

Evaluasi

- a.
- b.
- c.

BAB IV

PENUTUP

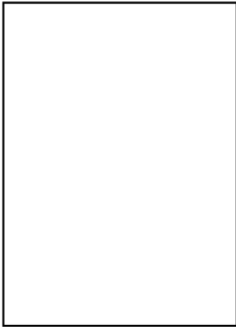
A. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

BIODATA PENULIS



Nama.....
.....
.....
..
.....
.....
..
.....
.....
..
.....
.....
..
.....
.....
..
.....
.....
..
.....
.....
..



BAHAN TAYANG

.....

.....

.....

Nama

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2018



BNPB

Mata Diklat A-1

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

Pelatihan Fasilitator

Penyusunan Rencana Kontinjensi

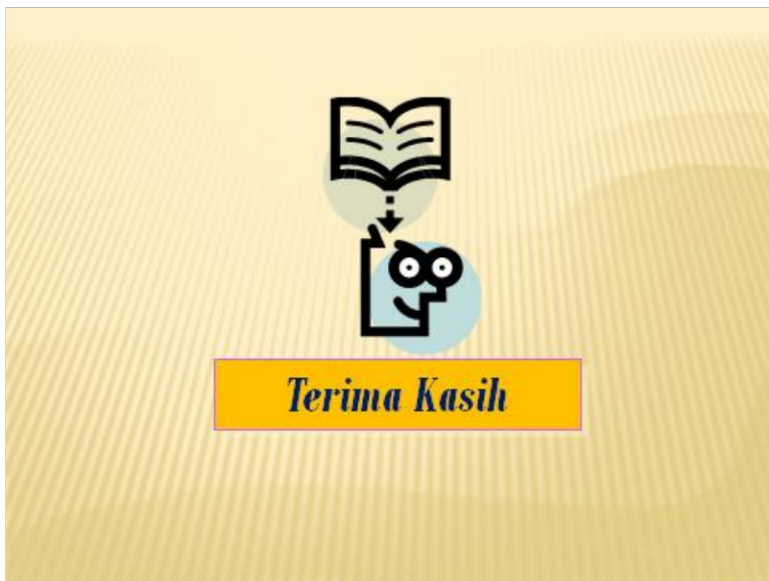
Dengan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas,
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB),
dan Pelibatan Lembaga Usaha

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

TUJUAN PEMBELAJARAN

POKOK BAHASAN

MATERI



| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Sasaran..... | 98 |
| B. Karakteristik Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan | Error! Bookmark not defined. |
| C. Karakteristik Tenaga Pengajar..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Karakteristik Penyelenggara | Error! Bookmark not defined. |
| E. Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan | Error! Bookmark not defined. |
| F. Metodologi Pendekatan Konsep Pelatihan Partisipatif | Error! Bookmark not defined. |
| G. Pengelolaan Pelatihan | 100 |
| H. Metode dan Media Pembelajaran yang Digunakan | 101 |
| I. Sumber Belajar | 102 |
| BAB IV PENUTUP..... | Error! Bookmark not defined. |
| LAMPIRAN | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Lembar Profil Lembaga | |
| 2. Daftar Kontak dan Instansi | |
| 3. Lembar Komitmen | |
| 4. Rencana Tindak Lanjut | |
| 5. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan | |
| 6. Jadwal Training of Facilitator | |
| 7. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) | |
| 8. Rencana Pembelajaran (RP) | |
| 9. Bahan Ajar (BA) | |
| 10. Bahan Tayang (BT) | |